

No. 175 September-Oktober 2020

www.baktinews.bakti.or.id

BaKTI News

MEMAHAMI KTI DENGAN SEKSAMA

**MENGUJI KEBERPIHAKAN ANGGARAN
KOTA MAKASSAR TERHADAP ISU DISABILITAS**

**PERJUANGAN PANJANG UNTUK
MASA DEPAN ANAK PANIAI**

**KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN
DI MASA PANDEMI**

TIDAK DIPERJUALBELIKAN
NOT FOR SALE

ISSN 1979-777X



9 771979 777057



BaKTINews
MEMAHAMI KTI DENGAN SEKSAMA

ISSN 1979-777X

www.baktinews.bakti.or.id

Penanggung Jawab **M. YUSRAN LAITUPA**
ZUSANNA GOSAL
Editor **VICTORIA NGANTUNG**
ITA MASITA IBNU

Editor Foto **ICHSAN DJUNAED**
Design & Layout **ICHSAN DJUNAED**
Sirkulasi **KHAIRIL ANWAR**

Redaksi

Jl. Daeng Ngeppe No. 1/10, Makassar 90223, Sulawesi Selatan - Indonesia Telp. +62 0411 832228 / 833383

Email info@bakti.or.id atau baktinews@bakti.or.id

Facebook www.facebook.com/yayasanbakti Twitter [@InfoBaKTI](https://twitter.com/InfoBaKTI) Instagram [@InfoBaKTI](https://www.instagram.com/InfoBaKTI)

BaKTI**News** adalah media pertukaran pengetahuan tentang pembangunan di Kawasan Timur Indonesia. Tujuan BaKTI**News** adalah mempromosikan praktik cerdas pembangunan dari berbagai daerah di Kawasan Timur Indonesia agar dapat diketahui oleh khalayak luas dan menginspirasi pelaku pembangunan di berbagai daerah dalam upaya menjawab berbagai tantangan pembangunan. BaKTI**News** terbit setiap bulan dalam dua bahasa, Indonesia dan Inggris, untuk memudahkan pembaca dalam mendapatkan informasi pembangunan dari Kawasan Timur Indonesia.

BaKTI**News** disirkulasi melalui pos kepada pembaca dengan target utama adalah para pelaku pembangunan yang berdomisili di daerah kepulauan dan daerah terpencil. Tidak dikenakan biaya apapun untuk berlangganan BaKTI**News** agar lebih banyak masyarakat yang dapat mengakses informasi pembangunan melalui majalah ini. Selain dalam bentuk cetak, BaKTI**News** juga dapat diakses di website BaKTI: www.baktinews.bakti.or.id dan dikirimkan melalui email kepada pelanggan yang dapat mengakses internet.

BaKTI**News** dikelola oleh Bursa Pengetahuan Kawasan Timur Indonesia (BaKTI). Seluruh artikel BaKTI**News** adalah kontribusi sukarela para pelaku pembangunan dari berbagai kalangan dan daerah yang ingin berbagi pengetahuan dengan khalayak luas.

*BaKTI**News** is a knowledge exchange media platform for development issues in eastern Indonesia. BaKTI**News** aims to promote development smart practices from different regions in eastern Indonesia so that the practices become known to a wider audience and inspire development stakeholders in other regions in their efforts to answer development challenges. BaKTI**News** is published monthly in two languages, Indonesian and English, to facilitate readers who don't understand Indonesian to gain a better understanding of development in eastern Indonesia.*

*BaKTI**News** is sent by post to readers and the main target is development stakeholders living in isolated regions and island regions. BaKTI**News** is provided free of charge so the development community can access relevant development information easily. BaKTI**News** is also provided in an electronic version that can be accessed on www.baktinews.bakti.or.id and can be sent electronically to subscribers with internet access.*

*BaKTI**News** is managed by the Eastern Indonesia Knowledge Exchange (BaKTI). All articles are contributed voluntarily by development stakeholders from different areas in eastern Indonesia who wish to share their information with a wider audience.*

BERKONTRIBUSI UNTUK BaKTINews****

Contributing to BaKTI**News**

BaKTI**News** menerima artikel tentang praktik baik dan pembelajaran program pembangunan, hasil-hasil penelitian dan pemanfaatan teknologi tepat guna dari berbagai daerah di Kawasan Timur Indonesia (Sulawesi, Maluku, Nusa Tenggara, dan Papua). Panjang artikel adalah 1.000 - 1.100 kata, menggunakan Bahasa Indonesia, ditulis dengan gaya populer. Foto-foto penunjang artikel sangat dibutuhkan. Tim editor BaKTI**News** akan melakukan edit terhadap setiap artikel yang akan dimuat untuk kesesuaian tempat dan gaya bahasa. Redaksi BaKTI**News** tidak memberikan imbalan kepada penulis untuk setiap artikel yang dimuat.

*BaKTI**News** accepts articles about good practices and lesson learnt from development programs, applied research results, and applied technology from different stakeholders and regions in eastern Indonesia (Sulawesi, Maluku, Nusa Tenggara, and Papua). Articles should be 1,000-1,100 words, in either Indonesian or English, and written in a popular style.*

*Articles should also be sent with photos that illustrate the article. Our editor team will edit each article to ensure the language style and available space. BaKTI**News** does not provide fee for authors who contribute articles for this magazine.*

MENJADI PELANGGAN BaKTINews****

Subscribing to BaKTI**News**

Anda dapat mengisi formulir yang tersedia pada laman BaKTI**News** Online baktinews.bakti.or.id untuk dapat menerima majalah BaKTI**News** langsung ke email Anda setiap bulannya. Jika Anda tinggal di Makassar, Anda dapat mengambil majalah BaKTI**News** cetak di Kantor BaKTI setiap hari kerja.

*You may fill out the form available on the BaKTI**News** Online page to be able to receive BaKTI**News** magazine directly to your email every month. If you live in Makassar, you can pick up the printed BaKTI**News** magazine at the BaKTI office on weekdays.*

Daftar Isi

BaKTI News

September - Oktober 2020

No. 175

- 1** Menguji Keberpihakan Anggaran Kota Makassar Terhadap Isu Disabilitas
Bagian I
Oleh **NUR SYARIF RAMADHAN**
- 5** Aplikasi Digital dalam Mendukung Layanan Kesehatan untuk Eliminasi Tuberkulosis di Indonesia
Oleh **MELYA FINDI**
- 9** Kajian Komoditas dengan Pendekatan Kolaborasi Multipihak: Praktik Kajian Bersama Pemerintah, Akademisi dan LSM
Oleh **RAHMAD SABANG**
- 13** Perjuangan Panjang untuk Masa Depan Anak Paniai
Oleh **SYAIFULLAH & DESY MUTIALIM**
- 17** Mendorong Langkah Serius Negara untuk Penghapusan Kekerasan Seksual di Tempat Kerja
Oleh **NABIYLA RISFA IZZATI**
- 21** Pendekatan *Growth Diagnostics* dalam Menganalisa Pertumbuhan Ekonomi
Oleh **RISVAN RIZALDI**
- 23** Replikasi SAIK di Kabupaten Fakfak
Oleh **HALIA ASRIANY**
- 27** Kekerasan Terhadap Perempuan di Masa Pandemi
Oleh **M. GHUFRAN H. KORDI K.**
- 30** Peran Ayah Dalam Aspek Eksklusif Penting: 2 Hal yang Bisa Dilakukan Pemerintah
Oleh **ANGGA SISCA RAHADIAN & LENGGA PRADIPTA**
- 33** Bersama Cegah Penyebaran COVID-19 di Kabupaten Nagekeo
Oleh **ROSADELIMA DEE PANDA**
- 37** Posyandu Prakonsepsi untuk Generasi Emas
Oleh **dr. ANANG S. OTOLUWA**
- 40** Cerita Menginspirasi
- 41** Batukarinfo.com

■ Foto Cover :
Yusuf Ahmad/BASICS





Menguji Keberpihakan Anggaran Kota Makassar Terhadap Isu Disabilitas

BAGIAN I

Oleh
NUR SYARIF RAMADHAN

DI PerDIK, ada dua cara yang kami gunakan untuk menilai keberpihakan pemerintah kota dalam memenuhi hak warganya yang difabel. Pertama, dengan melihat berapa banyak alokasi anggaran yang disediakan. Kedua, seberapa berpartisipasi atau seberapa terbuka ruang partisipasi bagi difabel pada proses perencanaan pembangunan yang digelar saban tahun.

Difabel Menganalisis Anggaran Pembangunan Berperspektif Disabilitas

Dalam setahun terakhir, Koalisi Organisasi Penyandang Disabilitas/Difabel Kota Makassar yang diorganisir PerDIK (Pergerakan Difabel Indonesia untuk Kesetaraan), menelusuri dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah



Ilustrasi: Ichsan Djumaed/Vayasan BaKTI

(APBD) realisasi tahun 2017 hingga 2019. Hal ini untuk melihat sejauh mana perhatian pemerintah kota dalam memenuhi hak warganya yang difabel serta apakah pemerintah telah menjalankan amanat Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 6 Tahun 2013 serta Peraturan Walikota Nomor 61 tahun 2015 tentang Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas.

Kenyataannya, Pemerintah Kota Makassar belum menjadikan isu disabilitas sebagai isu strategis. Dari dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2014-2019 Kota Makassar, pada Bab Analisis Isu-isu Strategis, tak satu pun bidang pembangunan yang memasukkan isu disabilitas sebagai isu kajian strategisnya. Pun dalam Bab Strategi dan Arah Kebijakan, serta Bab Kebijakan Umum dan Program Kebijakan Daerah tak ada kosa kata penyandang disabilitas termaktub. Padahal, dalam *Road Map* Reformasi Birokrasi yang disusun Pemerintah Kota Makassar bersama Koalisi untuk Reformasi Birokrasi (KuRBI) Sulsel pada 2014, telah memuat tentang pelayanan

publik yang responsif bagi disabilitas, diantaranya untuk layanan pendidikan, kesehatan dan layanan publik lainnya termasuk ke wilayah kepulauan.

Dengan menganalisis Anggaran Belanja dan Pendapatan Pemerintah Kota Makassar, warga disabilitas Makassar bermaksud berkontribusi dalam proses pembangunan Kota Makassar menuju kota layak difabel. Dengan melakukan hal ini, kami menunjukkan bahwa difabel tidak melulu hanya menjadi objek pembangunan, tetapi difabel juga berdaya dan terlibat dalam proses perencanaan pembangunan kota.

Ada tujuh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang dokumen anggarannya dianalisis dengan mempertimbangkan bahwa ke tujuh OPD ini yang banyak bersentuhan langsung dengan kebutuhan difabel di Kota Makassar. Ketujuh OPD yang dimaksud diantaranya adalah sebagai berikut.

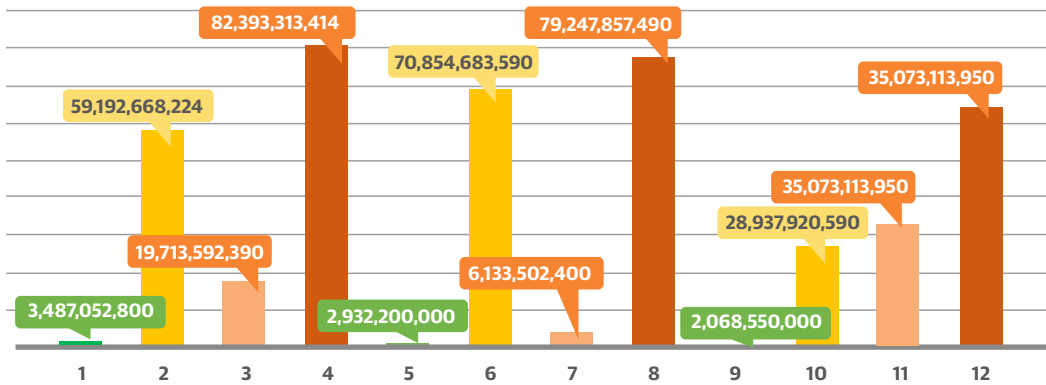
1. Dinas Pendidikan
2. Dinas Kesehatan
3. Dinas Pekerjaan Umum (PU)
4. Dinas Sosial
5. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A)
6. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
7. Dinas Pemuda dan Olahraga

Secara keseluruhan, alokasi belanja untuk isu disabilitas yang dapat diidentifikasi, tertinggi pada tahun 2017 dan cenderung turun pada tahun 2019.

Persentase jenis belanja per tahun, menunjukkan bahwa alokasi belanja untuk belanja barang dan jasa masih cenderung mendominasi pada 2017 dan 2018. Sedangkan pada tahun 2019, mulai terjadi perubahan dimana persentase belanja moda lebih tinggi dibandingkan jenis belanja lainnya.

Pada 10 Maret 2020, Koalisi Organisasi Disabilitas se-Kota Makassar menyerahkan daftar usulan kepada Kepala Bappeda Kota Makassar terkait alokasi anggaran pembangunan kota Makassar untuk tahun anggaran 2020 dan tahun berikutnya. Usulan ini merupakan hasil diskusi bersama dan menjadi bagian dari bentuk partisipasi difabel dalam perencanaan pembangunan Kota Makassar.

GRAFIK 1 Alokasi Belanja Isu Disabilitas di 7 OPD Pada APBD Kota Makassar 2017 - 2019



Sumber : APBD Realisasi Kota Makassar Tahun 2017 dan 2018, APBD Pokok Kota Makassar tahun 2019

Adapun anggota koalisi ini adalah sebagai berikut.

1. Pergerakan Difabel Indonesia untuk Kesetaraan PerDIK
2. Gerakan Kesejahteraan Tuli/Tuna Rungu Indonesia, GERKATIN Makassar
3. Ikatan Tuna Netra Muslim Indonesia, ITMI Sulawesi Selatan
4. Persatuan Tuna Netra Indonesia, Pertuni Sulawesi Selatan
5. Gerakan Mahasiswa dan Pelajar untuk Kesetaraan, Gemparkan
6. Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia, HWDI Sulawesi Selatan
7. Perhimpunan Mandiri Kusta, PerMaTa Makassar
8. Pustakabilitas Indonesia

Adapun bidang-bidang pembangunan yang dianggap penting oleh difabel adalah sebagai

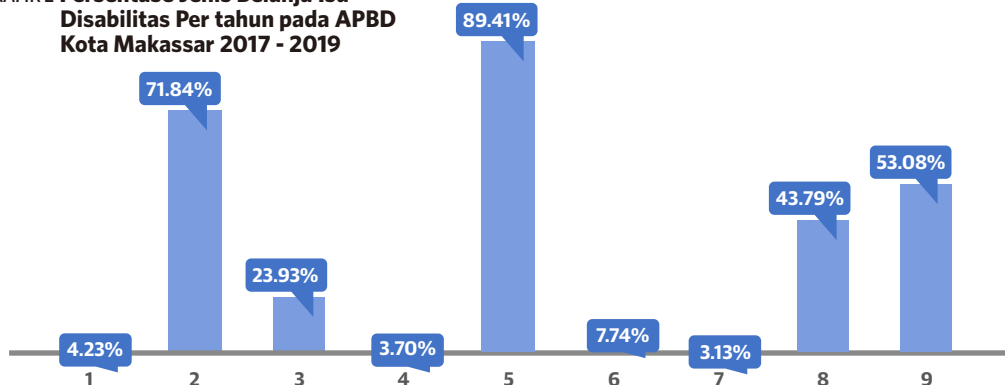
berikut:

1. Bidang Mobilitas dan Fasilitas Umum
2. Bidang Pendidikan
3. Bidang Kesehatan
4. Bidang Ketenagakerjaan
5. Bidang Ekonomi
6. Bidang Politik dan kewarganegaraan
7. Bidang Bantuan dan Jaminan Sosial
8. Bidang Informasi dan Komunikasi
9. Bidang Olahraga, Rekreasi dan Kesenian
10. Bidang Hukum dan HAM
11. Bidang Teknologi Tepat Guna
12. Bidang Pengurangan Risiko Bencana

Nol Koma Nol Sekian Persen Anggaran Inklusi di Bidang Pendidikan

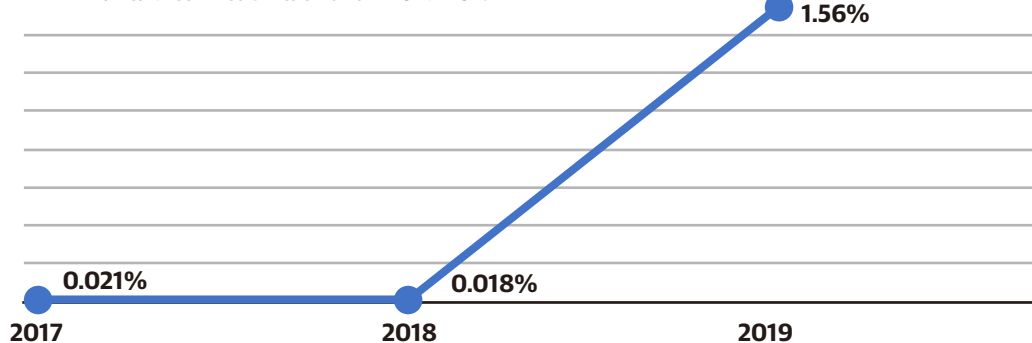
Tanggung jawab dinas pendidikan dalam pemenuhan hak difabel dalam sektor pendidikan secara umum dapat dibagi menjadi

GRAFIK 2 Persentase Jenis Belanja Isu Disabilitas Per tahun pada APBD Kota Makassar 2017 - 2019



Sumber : APBD Realisasi Kota Makassar Tahun 2017 dan 2018, APBD Pokok Kota Makassar tahun 2019

GRAFIK 3 **Persentase Anggaran Dinas Pendidikan untuk Isu Disabilitas Tahun 2017-2019**



Sumber : APBD Realisasi Kota Makassar Tahun 2017 dan 2018, APBD Pokok Kota Makassar tahun 2019

Kenyataannya, Pemerintah Kota Makassar belum menjadikan isu disabilitas sebagai isu strategis. Dari dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2014-2019 Kota Makassar, pada Bab Analisis Isu-isu Strategis, tak satu pun bidang pembangunan yang memasukkan isu disabilitas sebagai isu kajian strategisnya.

dua hal penting, yakni bidang infrastruktur dan non-infrastruktur. Untuk bidang infastruktur, Dinas Pendidikan harus memastikan ketersediaan sarana dan prasarana yang mendukung proses pembelajaran yang akses bagi difabel, seperti lingkungan dan gedung sekolah, serta ketersediaan bahan ajar dan buku teks dalam bentuk huruf Braille, audio CD, maupun alat peraga visual.

Sedangkan untuk bidang non-infrastruktur, beberapa hal yang mesti menjadi perhatian diantaranya adalah peningkatan kapisitas guru agar terampil menangani kelas inklusif, pengembangan kurikulum pendidikan inklusi, serta menyediakan guru pendidikan khusus yang disesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan anak didik. Sayangnya, dalam dokumen anggaran dinas pendidikan yang dianalisis koalisi organisasi disabilitas Kota Makassar, masih belum ada informasi ditemukan jika dinas pendidikan menjalankan program-program tersebut.

Total Anggaran untuk Dinas Pendidikan Kota Makassar pada 2017 sebanyak tak kurang dari 824 milyar rupiah atau sekitar 25% dari total Belanja pada APBD tahun 2017. OPD ini menempati persentase alokasi tertinggi dibandingkan OPD lainnya. Kondisi ini juga terjadi di 2018. Untuk 2019, meskipun mengalami peningkatan dari jumlah namun secara persentase dari total belanja mengalami penurunan yaitu hanya 22%.

Jika ditelusuri lebih jauh untuk anggaran terkait isu disabilitas, ternyata anggaran pada tahun 2017 dan 2018 masing-masing hanya sekitar 0,021% dan 0,018%.

Anggaran Dinas Pendidikan Kota Makassar dari 2017-2018 terjadi penurunan sebesar 14 juta rupiah atau 8,22%. Anggaran di 2017 ke 2018 memiliki kegiatan yang sama tetapi belanja pegawai dan belanja barang dan jasa lebih besar di 2017, yakni mencapai lebih dari 175 juta rupiah sedangkan 2018 sebesar 161 juta rupiah.

Selanjutnya di 2018 ke 2019 terjadi peningkatan jumlah anggaran yang mencapai 14 milyar rupiah dengan pertumbuhan mencapai 8772%. Pertumbuhan yang sangat signifikan ini karena adanya alokasi anggaran di 2019 rehabilitasi sekolah. Khusus untuk kegiatan ini, masih perlu dilakukan pemantauan lebih lanjut untuk mengetahui apakah output dari rehabilitasi sekolah tersebut dapat diakses bagi difabel atau tidak.

INFORMASI LEBIH LANJUT

Penulis adalah Peneliti pada lembaga PerDIK dan Alumni Program INSPIRASI. Penulis dapat dihubungi melalui email: ramadhansarro@gmail.com

Aplikasi Digital dalam Mendukung Layanan Kesehatan untuk Eliminasi Tuberkulosis di Indonesia

Oleh **MELYA FINDI**





i era digital saat ini, aplikasi memiliki peran penting dalam mendukung layanan kesehatan bagi masyarakat. Yayasan KNCV Indonesia mengembangkan tiga buah produk digital sebagai sarana pendukung layanan, media edukasi, dan membangun jejaring dalam upaya eliminasi tuberkulosis di Indonesia. Aplikasi digital ini dapat digunakan oleh semua pihak, baik masyarakat, kelompok pendamping pasien, serta petugas layanan kesehatan.

Ketiga aplikasi ini dikembangkan dalam menjawab sejumlah persoalan penanggulangan TBC di Indonesia. Persoalan transportasi spesimen yang terhambat di sejumlah daerah dapat berdampak pada tertundanya diagnosa TBC seseorang, kemudian minimnya edukasi TBC membuat masyarakat enggan atau bahkan tidak berinisiatif untuk melakukan pemeriksaan. Serta putusnya pengobatan karena tidak adanya monitoring pengobatan pasien TBC resistan obat oleh pendamping. Sebagai negara dengan beban TBC nomor tiga tertinggi di dunia, tentunya ini menjadi PR besar bagi sejumlah pihak untuk saling bersinergi mengatasi hal ini. Berikut adalah ketiga aplikasi digital yang digunakan dalam mendukung penanggulangan TBC.



SITRUST

SITRUST (Sistem Informasi *Treking* Untuk tranSPorTasi spesimen) adalah sistem informasi untuk memantau pergerakan pengiriman paket contoh uji mulai dari proses pemesanan, penjemputan oleh kurir, konfirmasi penerimaan, umpan balik terkait kondisi contoh uji, hingga rekapitulasi hasil pemeriksaan contoh uji. SITRUST terdapat dalam dua bentuk, yaitu aplikasi berbasis web untuk mengelola data dan akun pengguna SITRUST dan aplikasi *mobile* berbasis Android yang digunakan untuk

mengirim dan menerima contoh uji. Selain berfungsi sebagai alat pelacak, SITRUST juga mendukung rekapitulasi pencatatan dan pelaporan pengiriman contoh uji secara elektronik.

SITRUST dikembangkan oleh Yayasan KNCV Indonesia bersama dengan Kementerian Kesehatan menggunakan teknologi terbaru yang terbuka serta menggunakan jaringan internet agar aplikasi bisa digunakan oleh banyak pengguna sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya. SITRUST versi *offline* juga telah dikembangkan melalui layanan sms untuk mengakomodir pengiriman di daerah dengan jaringan internet sulit.

Pada tahun 2019, SITRUST telah berhasil mengirimkan lebih dari 20.000 contoh uji dahak setiap bulannya untuk pemeriksaan Tes Cepat Molekuler (TCM) & C/DST dengan total contoh uji tercatat mencapai 327,083. Terbukanya akses terhadap layanan diagnosis dengan TCM berhasil membantu menemukan 29,979 (18%) kasus TBC sensitif obat dan 1,645 (1%) kasus TBC resistan obat. Bertambahnya jumlah pemeriksaan akibat rujukan contoh uji juga terlihat pada peningkatan utilisasi TCM. Kabupaten/kota yang telah mengimplementasikan sistem ini mengalami peningkatan utilisasi TCM sampai dua kali lebih tinggi dibandingkan kabupaten/kota lainnya. Pelaksanaan kegiatan rujukan yang stabil dan berkelanjutan ini menjadi pertanda positif bahwa mekanisme yang dibangun mudah untuk diterima, diperluas dan terasa manfaatnya.

Keberhasilannya dalam mendukung layanan tuberkulosis ini kemudian direplikasi untuk dapat mendukung layanan HIV. Tahun ini SITRUST digunakan untuk mendukung layanan transportasi spesimen bagi pemeriksaan *viral load* HIV pada ODHA. Teknis mekanismenya penggunaannya serupa dengan transportasi spesimen pada layanan TBC. Meski demikian ada sejumlah modifikasi yang dilakukan untuk dapat mengakomodir kebutuhan layanan pengiriman pada pemeriksaan *viral load*, seperti format formulir dan sejumlah fitur yang disesuaikan.



Penjemputan sampel uji dari fasilitas pelayanan kesehatan. Foto : Dok. Yayasan KNCV Indonesia



EMPATI

EMPATI (e-TB Mobile untuk Pendampingan Pasien TBC) adalah sistem informasi berbasis *mobile* Android dirancang

untuk membantu petugas kesehatan, manajer kasus, kader dan pendidik sebaya dalam melakukan pendampingan dan memastikan pasien khususnya TBC Resistan Obat (TBC RO) menyelesaikan pengobatan. Disamping itu, juga berfungsi untuk digitalisasi formulir penilaian awal, kontak investigasi dan pendampingan rutin. EMPATI terhubung langsung dengan database eTB *manager* untuk dapat melakukan penarikan data pasien terkonfirmasi TBC RO termasuk update pencatatan dan pelaporan absensi pengobatan.

Penggunaan aplikasi *mobile* dipilih agar pengguna dapat memperoleh data dan informasi yang diperlukan dimanapun dan kapanpun diperlukan. Tahun ini, aplikasi ini akan diuji cobakan ke sejumlah wilayah di Indonesia untuk membantu dalam pendampingan pasien TBC resistan obat agar

tuntas dalam pengobatan. Dalam rencana akselerasi penanggulangan TBC Resistan Obat, pemerintah menargetkan adanya peningkatan keberhasilan pengobatan dari 19% di tahun 2018 menjadi 36% di tahun 2020. Upaya ini memegang tiga prinsip, yaitu layanan berpusat pada pasien, kualitas program dan layanan TBC Resistan Obat, serta pemanfaatan teknologi dalam meningkatkan notifikasi TBC Restistan Obat. EMPATI berkontribusi dalam hal pemanfaatan teknologi dalam membantu proses pendampingan pasien TBC Resistan Obat dalam melakukan pengobatan.

SOBAT TB



SOBAT TB, sebuah aplikasi berbasis android yang ditujukan untuk masyarakat umum ini berisi informasi-informasi kesehatan terkait Tuberkulosis (TB/TBC),

daftar fasilitas layanan kesehatan (Puskesmas, Rumah Sakit), serta ruang berbagi bagi komunitas terkait TB.



Pengantaran oleh petugas pos dan paket sampel uji tiba di fasyankes TCM. Foto : Dok. Yayasan KNCV Indonesia

Aplikasi ini dibuat untuk membantu masyarakat agar lebih menyadari dan memahami mengenai gejala TBC, sehingga individu terduga TBC dapat memeriksakan dirinya ke fasyankes (Fasilitas Layanan Kesehatan) terdekat. Serta lebih jauh memahami prosedur pengobatannya.

Aplikasi SOBAT TB memiliki sejumlah fitur diantaranya adalah informasi tentang TBC yang dapat membantu pengguna mendapatkan informasi umum mengenai TBC, lengkap dengan langkah-langkah yang dapat dilakukan pasien yang terdiagnosa TBC agar mendapatkan layanan yang akurat. Selain itu aplikasi ini juga menyediakan fasilitas informasi Layanan Kesehatan Terdekat di seluruh wilayah di Indonesia, yang dilengkapi informasi fasilitas TBC serta kontak layanan. Pengguna juga dapat berinteraksi melalui Forum Diskusi Bersama Kelompok Pasien untuk dapat berbagi informasi terkait TBC melalui forum diskusi interaktif. Dalam forum ini, pasien juga dapat bertanya secara langsung dengan narasumber (Dinas Kesehatan, Dokter, dll) sehingga jawaban dan informasi yang diberikan lebih akurat.

Aplikasi ini dapat diunduh oleh masyarakat umum melalui *Google Play Store*, dan telah diuji

coba terlebih dahulu di daerah Jakarta Selatan. Sebelumnya Yayasan KNCV Indonesia menggelar kegiatan simulasi dan sosialisasi awal penggunaan aplikasi SOBAT TB pada tanggal 10 Oktober 2019 lalu di Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta. Acara ini melibatkan perwakilan dari sejumlah rumah sakit dan Puskesmas di Jakarta Selatan, staf Dinas Kesehatan DKI Jakarta, dan Suku Dinas Kesehatan Jakarta Selatan.

Persoalan TBC di Indonesia terjadi di hampir seluruh wilayah. Digital aplikasi membuktikan bahwa pemanfaatan teknologi dapat membantu para penyelenggara layanan kesehatan dalam memberikan layanan yang efektif dan efisien, terutama dalam menjangkau setiap wilayah. Dengan kata lain, revolusi digital di bidang kesehatan saat ini didorong pesatnya teknologi dan inovasi dalam bidang kesehatan. Pemanfaatan teknologi digital yang dilakukan oleh YKI merupakan salah satu cara organisasi non-Pemerintah dapat berkontribusi secara inovatif untuk program kesehatan di Indonesia.

INFORMASI LEBIH LANJUT

Untuk mendapatkan informasi lebih lanjut mengenai aplikasi yang dikembangkan Yayasan KNCV Indonesia dapat menghubungi:

Amadeus Rembrandt - Communication Coordinator

Yayasan KNCV Indonesia melalui email:

amadeus.rembrandt@yki4tbc.org



KAJIAN KOMODITAS DENGAN
PENDEKATAN KOLABORASI MULTIPIHAK:

Suatu Praktik Kajian Bersama Pemerintah, Akademisi dan LSM

Oleh **RAHMAD SABANG**

S

udah menjadi komitmen Gubernur Nurdin Abdullah, sejak dipercaya masyarakat menjadi nakhoda pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, menjalankan pemerintahan dan pembangunan dengan pendekatan sinergitas dengan para pihak dan mengarusutamakan (*mainstreaming*) kajian/riset pada setiap agenda kebijakan pemerintah provinsi. Karena itulah, kehadiran *pilot* program kebijakan berbasis pengetahuan di Sulawesi Selatan, atas kerja sama BaKTI-KSI dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan melalui BAPPELITBANGDA, dengan dukungan dana pemerintah Australia dan BAPPENAS mendapat sambutan positif.



Sutra Soppeng pernah berjaya puluhan tahun silam namun meredup dan membuat budi daya ulat sutera menjadi cukup asing bagi generasi sekarang. Kini Pemerintah Kabupaten Soppeng berkomitmen untuk mengembalikan kejayaan sutra Soppeng.

Sumber Foto : <https://distan.soppengkab.go.id>

dengan pilihan Peraturan Gubernur (Pergub) atau Surat Keputusan Gubernur (SK).

Di fase pertama, proses penyusunan agenda berproses pertemuan informal dengan *stakeholder* kunci pembangunan dan lima kali pertemuan formal, yang akhirnya menghasilkan rumusan kajian rantai nilai komoditas, dengan kesepakatan menetapkan sutra dan talas satoimo sebagai pintu masuk kajian. Perjalanan menuju fase kajian, dengan dua komoditas dihadang pandemi COVID-19, yang mulai merebak di Makassar pada pertengahan Maret. Skenario kajian-pun berubah, dari dua komoditas menjadi satu, disepakati fokus pada sutra, yang sepenuhnya mengandalkan sumber daya KSI dan BaKTI. Jadilah agenda menyisakan talas satoimo, dengan harapan, ke depan BAPPELITBANGDA memprogramkan kajian rantai nilai komoditas sutra sebagai prioritas kajian.

Penundaan kajian talas satoimo, direspon oleh Prof. Nurdin Abdullah, dengan harapan kajian komoditas rantai nilai talas satoimo juga diprioritaskan. Menurutnya komoditas talas satoimo dan sutra sama pentingnya, keduanya berpeluang menopang ekonomi Sulawesi Selatan kedepan. Bisa dipahami, sebagai komoditas baru, boleh jadi talas satoimo adalah jawaban atas rekomendasi forum multipihak pada proses agenda *setting*. Bahwa, pertumbuhan ekonomi Sulawesi

Respon ini disampaikan Gubernur Nurdin Abdullah awal Agustus 2020 saat menerima kunjungan Deputy Direktur Yayasan BaKTI, Zusanna Gosal dan tim di Rumah Jabatan Gubernur. Pada pertemuan itu, dilaporkan perkembangan program pilot program kebijakan berbasis pengetahuan, yang telah memasuki fase kedua dari tiga fase yang diagendakan. Fase pertama, adalah proses agenda *setting* selesai Maret 2020, dilanjutkan, fase ke dua adalah pelaksanaan kajian dalam rangka proses formulasi kebijakan yang akan berlangsung hingga akhir tahun ini, dan fase ke tiga adalah pengambilan kebijakan, ini ranahnya Gubernur untuk menetapkan regulasi,



Para perempuan yang membudidayakan ulat sutra di Kabupaten Enrekang, Sulawesi Selatan, melakukan proses untuk menghasilkan benang dengan cara yang sangat tradisional.

Sumber Foto : (tangkapan layar) **Netmediatama**
https://www.youtube.com/watch?v=_jvOqXBIYOA&t=86s

Saat perekonomian nasional dan wilayah di tanah air menikmati surplus melalui margin keuntungan selama pertumbuhan ekonomi, petani kecil dan buruh tani nyaris tidak memperoleh tetesan ke bawah secara berarti. Kehidupan mereka tetap pada batas tertinggi tingkat subsistem. Data Susenas yang setiap tahun dirilis menunjukkan petani kecil dan buruh tani secara laten tergolong ke dalam kelompok pendapatan 40% terbawah. Dalam kelompok pendapatan ini, mereka tergolong mayoritas, berdampingan dengan kaum marginal yang hidup di daerah perkotaan. Di saat COVID-19 yang menyebar cepat, mereka ini sudah lama terjerambab lalu kemudian tentu saja semakin terhimpit.

Secara keilmuan, dengan nalar yang logis, bila COVID-19 ini merupakan kanker dalam kehidupan petani kecil dan buruh tani, pasti saja sudah didiagnosis pada stadium tinggi. Logikanya, ajal kehidupan mereka tinggal menunggu tarikan napas terakhir. Oleh karena mereka tidak pernah memiliki kesempatan

untuk dapat mengakumulasi kapital, bahkan tabungan sekalipun. Namun realitasnya, mereka tidak memiliki syaraf putus asa. Betapa pun berat dampak COVID-19 ini ikut dirasakan oleh mereka, tetapi asap dapur mereka tetap bisa mengepul. Ekonomi rumah tangga mereka tetap berputar. Ternyata dalam rumah tangga petani kecil dan buruh tani, ada jaringan syaraf kehidupan yang mampu untuk memperbarui dirinya. Dalam konyungtur ekonomi menaik ataupun menurun. Begitulah, sudah dalam beberapa dekade tatanan kehidupan ekonomi mereka.

Selama masa Pandemi COVID-19, nyaris setiap saat teriakan pelaku ekonomi, termasuk yang berskala besar, untuk mendapatkan pemihakan kebijakan dan dukungan perhatian pemerintah, bisa disimak dari media massa. Tetapi nyaris pula tidak pernah terdengar ada teriakan petani kecil dan buruh tani. Padahal, dapat dikatakan bahwa ekonomi rumah tangga merekalah yang sedikit banyak berperan memutar roda perekonomian makro selama serangan COVID-19 ini. Wacana kebijakan ekonomi yang banyak dibahas masih saja dalam perspektif ingin menggerakkan perekonomian agar pada gilirannya bisa mendorong kembali pertumbuhan ekonomi. Bagaimana dan seperti apa nalar ekonominya dalam realitas seperti sekarang ini, di saat sisi *supply* terpuruk dan sisi

demand terjungkal? Upaya yang paling logis adalah menata kembali usaha ekonomi yang ada selama ini, oleh pelakunya sendiri. Itupun nampaknya membutuhkan waktu dalam bilangan satu dua tahun, untuk bisa berpikir pertumbuhan, bila mampu. Tatanan kehidupan ekonomi saat ini dan ke depan, akan sangat lain pencerminannya. Ini yang terlebih dahulu harus dipetakan.

Dunia usaha berikut pelaku dan entitas bisnisnya, tidak seyogyanya berpikir untuk segera mendapat dukungan dari pemerintah saat ini. Oleh karena bisa saja berarti akan terjadi *potential economic lost* dalam masyarakat secara keseluruhan. Perhitungan-perhitungan keekonomian yang biasa digunakan selama ini, sudah banyak yang tidak *valid* lagi. Tidak mustahil institusi pendidikan ekonomi, keuangan dan bisnis perlu banyak merevisi baik cara pandang maupun wawasan praktikal dalam kehidupan ekonomi empirik yang telah diajarkan selama ini. Dunia ekonomi, disadari ataupun tidak, telah berubah secara mendasar dewasa ini. Sejumlah ahli sudah dengan fasihnya mengungkapkan cara pandang dan wawasannya, dan sangat menyarankan agar pelaku ekonomi sadar dan paham untuk beradaptasi dalam perubahan yang ada dan sementara berlangsung sekarang.

Justru pada saat yang sama, saat ini pusat perhatian sepatutnya ditujukan pada kegiatan ekonomi produktif apa yang masih berputar dan memiliki kapasitas suplai, di satu pihak, dan di pihak lain, bagaimana permintaan efektif atas barang dan jasa yang mampu dihasilkannya. Inilah tantangan namun sekaligus momentum peluang yang tersedia bagi penentu kebijakan dan pelaku ekonomi di wilayah Sulawesi Selatan saat ini. Bila menyimak kembali kondisi resesi ekonomi dan moneter akhir 1990an, sektor pertanian Sulawesi Selatan telah tampil perkasa, namun sayangnya motivasi pertumbuhan yang diwariskan oleh rezim Orde Baru tidak berkurang atau bahkan semakin menggebu-gebu dengan memilih komoditas pertanian andalan. Dalam realitasnya justru kurang memberi perhatian pada pelakunya. Pertumbuhan ekonomi di wilayah ini melaju, namun hanya lebih banyak dinikmati marjin ekonominya oleh pedagang perantara dan eksportir. Struktur perekonomian wilayah Sulawesi Selatan tidak

Betapa pun berat dampak COVID-19 ini ikut dirasakan oleh mereka, tetapi asap dapur mereka tetap bisa mengepul.

Ekonomi rumah tangga mereka tetap berputar. Ternyata dalam rumah tangga petani kecil dan buruh tani, ada jaringan syaraf kehidupan yang mampu untuk memperbarui dirinya.

semakin baik, senyatanya sektor industri pengolahan berbasis pertanian tidak berkembang. Pengalaman seperti ini sepatutnya tidak berulang kembali paska Pandemi COVID-19.

Suka atau tidak suka, hanya beberapa komoditas andalan Sulawesi Selatan yang memiliki struktur produksi yang handal, seperti padi, jagung dan rumput laut. Selebihnya, bila tetap ingin dipacu pengembangannya akan *membutuhkan biaya yang tinggi*, bahkan mungkin saja sudah tidak ekonomis lagi. Oleh karena itu, perhatian dan kebijakan yang berpihak pada rumah tangga produktif di sektor pertanian saat ini, nampaknya menjadi hal yang niscaya. Mencermati potensi permintaan efektif komoditas pertanian yang bisa dihasilkannya, domestik maupun ekspor, sudah memerlukan kerangka pengembangan serta agenda aksi yang sistematis dan terstruktur. Dalam pemilihan komoditas, penting sekali mencermati usaha pertanian yang memang selama ini diakrabi oleh petani kecil dan buruh tani yang jumlahnya sangat banyak itu.

Dalam ungkapan dan pidato para pejabat di wilayah ini, masih selalu terdengar dan didengungkan bahwa wilayah ini berbasis pertanian. Data makro juga bisa membuktikan hal tersebut. Oleh karena itu inilah saatnya kita meletakkan kembali komoditas unggulan seperti sutera ke dalam pondasi ekonomi di Sulawesi Selatan.

INFORMASI LEBIH LANJUT

Untuk mendapatkan informasi lebih lanjut tentang Program Kebijakan Berbasis Pengetahuan di Sulawesi Selatan, Anda dapat menghubungi email: info@bakti.or.id



Perjuangan Panjang Untuk Masa Depan Anak Paniai

Oleh

SYAIFULLAH & DESY MUTIALIM

Beberapa wanita setengah baya berdiri di depan sekumpulan ibu yang duduk di atas hamparan rumput. Mereka berada di bawah naungan tenda biru sederhana yang dibangun dengan tiang kayu. Di dekat para ibu setengah baya itu ada beberapa lembar poster berukuran A2 yang dipasang di balok kayu yang melintang setinggi lebih kurang 1,5 meter. Beragam poster itu adalah materi komunikasi dan sosialisasi program BANGGA Papua.

Hari ini ada kegiatan sosialisasi dan pendataan Program BANGGA Papua di Kabupaten Paniai yang



Foto: Syaifulah/Yayasan BaKTI

diadakan di bulan Juni 2019 di kampung Pasir Putih, Distrik Ekadide. Kegiatan ini merupakan kelanjutan dari pelatihan komunikasi yang diadakan sebulan sebelumnya di Kantor BAPPEDA Kabupaten Paniai di Madi. Sebelumnya dalam pelatihan komunikasi yang difasilitasi oleh mitra pembangunan KOMPAK dan Yayasan BaKTI, para kader Posyandu, tenaga kesehatan, dan anggota Tim Penggerak PKK (TP-PKK) dibekali kemampuan sosialisasi dan komunikasi selain pengetahuan dasar tentang BANGGA Papua. Tujuannya agar mereka bisa membantu tim Sekber BANGGA Papua Kabupaten Paniai mendata penerima manfaat dan melakukan sosialisasi program.

Pendataan warga telah seringkali dilakukan di Kabupaten Paniai untuk beragam jenis program bantuan. Namun kebanyakan dari program-program tersebut tidak direalisasikan. Akibatnya, warga merasa ditipu.

Pendataan penerima manfaat dan sosialisasi program BANGGA Papua di Paniai bukan hal yang mudah. Data kependudukan di Papua memang selalu menjadi salah satu tantangan. Beratnya tantangan alam dan terbatasnya sumber daya manusia menjadikan pendataan kependudukan menjadi sangat sulit. Akibatnya, data kependudukan yang sudah terintegrasi dalam sistem kependudukan nasional masih tergolong rendah. Tidak terkecuali di Kabupaten Paniai.

Kabupaten Paniai terdiri dari 24 distrik dan 216 kampung. Tidak semua distrik dan kampung bisa dijangkau dengan transportasi darat. Beberapa distrik seperti Baya Biru, Bogobaida atau Siriwo hanya bisa dijangkau lewat jalur udara alias menggunakan pesawat terbang kecil atau helikopter. Distrik tersebut hanya bisa dijangkau dengan berjalan khaki berhari-hari atau menyewa pesawat atau helikopter berarti harus siap merogoh kocek minimal 70 juta rupiah untuk pergi dan pulang.

Melakukan pendataan di distrik-distrik tersebut membutuhkan sumber daya yang besar. Padahal anggota Sekber BANGGA Papua Paniai yang aktif tidak sampai 30 orang. Kondisi ini jelas mempersulit kerja tim Sekber BANGGA Papua di Paniai untuk mendata calon penerima manfaat, ibu-ibu yang memiliki anak usia empat tahun ke bawah. "Akhirnya untuk pendataan, kita mengandalkan kepala kampung saja. Data dari mereka itu kita verifikasi di kabupaten," kata Elieser Yogi yang akrab disapa Eli.

Tantangan Lain Pendataan

Selain tantangan geografis masih ada tantangan lain dalam mendata calon penerima



manfaat program BANGGA Papua di Paniai, yaitu adanya penolakan dari warga. Kecurigaan warga terhadap kegiatan pendataan sangat tinggi akibat trauma masa lalu.

Menurut Eli Yogi, pendataan warga telah sering kali dilakukan di Kabupaten Paniai untuk beragam jenis program bantuan. Namun kebanyakan dari program-program tersebut tidak direalisasikan. Akibatnya, warga merasa ditipu.

Selain trauma, ada pula sekelompok warga yang takut untuk melakukan perekaman biometrik (pemindaian sidik jari dan retina) salah satu tahap untuk dapat memiliki NIK (Nomor Induk Kependudukan) yang tercantum dalam e-KTP. Menurut mereka pemeriksaan biometrik ini adalah bagian dari ajaran sesat sehingga bertentangan dengan kepercayaan mereka.

Arah Angin Mulai Berubah

Selepas pencairan dana tahap pertama di Desember 2018, Sekber BANGGA Papua Kabupaten Paniai mulai memikirkan strategi berbeda untuk melakukan pendataan. Salah satunya adalah dengan menggandeng kader Posyandu, tenaga kesehatan, dan anggota TP-PKK yang tersebar di seluruh distrik di Kabupaten Paniai dan mengenal keluarga yang punya anak usia empat tahun ke bawah.

Para kader Posyandu, tenaga kesehatan dan anggota TP-PKK ternyata telah memiliki strategi dan kemampuan yang luar biasa untuk mendekati calon penerima manfaat. Mereka paham cara menggunakan kedekatan psikologis dengan calon penerima manfaat sehingga informasi yang disampaikan dapat diterima meski tidak selamanya berjalan lancar.

Hasilnya, di pencairan dana tahap pertama periode Januari-Juni 2019 jumlah penerima manfaat BANGGA Papua dapat menjangkau 5.405 ibu penerima manfaat dan 7.618 anak usia empat tahun. Jumlah ini lalu meningkat drastis di periode berikutnya, Juli-Desember 2019 menjadi 8.270 ibu penerima manfaat dan 11.942 anak usia empat tahun.

“Pencairan dana pertama tahun 2018 itu membuat banyak warga yang akhirnya percaya kalau ini bukan tipu-tipu. Mereka akhirnya mau didata,” kata Eli Yogi. Perpaduan antara strategi menggandeng mitra dari kader Posyandu, tenaga kesehatan, dan anggota TP-PKK juga menjadi bukti nyata pencairan dana.

Data Berguna Bagi OPD Lain

Hari ini, Sekber BANGGA Papua Kabupaten Paniai telah memiliki data penerima manfaat yang cukup akurat. Salah satu syarat utama penerima manfaat BANGGA Papua adalah harus



Foto-foto: Syaifullah/Yayasan BaKTI

memiliki NIK, dan itu berarti data penerima manfaat BANGGA Papua adalah data yang riil dan bisa dipertanggungjawabkan.

“Data kami sudah terintegrasi dengan data kependudukan nasional,” kata Eli Yogi. Menurutnya lagi, Sekber BANGGA Papua telah menyumbang sekitar 25% data kependudukan untuk Kabupaten Paniai. Data ini ternyata juga digunakan oleh Dinas Perumahan Paniai dalam mendapatkan bantuan dari Kementerian Pekerjaan Umum bagi program pengadaan rumah bagi Orang Asli Papua di Paniai. Menurut Eli Yogi, saat ini ada beberapa OPD lain lagi yang juga menggunakan data yang dikumpulkan oleh Sekber BANGGA Papua.

Inspirasi dari BANGGA Papua bukan hanya di soal pendataan, tapi juga di sisi pengelolaan organisasi. Saat ini, Bupati Paniai Meki Nawipa sedang menggagas program Paniai untuk Lansia. Sebuah program perlindungan sosial bagi orang-orang tua di Paniai yang berusia 68 tahun ke atas. Pengelolaan program ini terinspirasi dari pengelolaan program BANGGA Papua. Salah satunya adalah dengan membentuk tim Sekber yang berisi orang dari lintas OPD sehingga bisa menerobos sekat-sekat dan ego sektoral.

Bupati Paniai, Meki Nawipa memang mengakui kalau program yang untuk tahap pertama ini dilaksanakan di tujuh distrik memang terinspirasi dari BANGGA Papua. Dalam rekaman wawancara dengan Yayasan BaKTI pada Maret 2020, Meki Nawipa menyebut program ini sebagai inspirasi tindak lanjut dari BANGGA Papua.

Dalam rentang tiga tahun sejak dimulai di akhir 2017 lalu, program BANGGA Papua di Paniai memang terbukti mampu memberi dampak positif yang signifikan. Selain pemahaman dan pengetahuan warga tentang gizi yang meningkat, efek samping seperti data kependudukan yang lebih rapi serta inspirasi tindak lanjut yang mulai dilaksanakan juga bisa dirasakan oleh warga.

Awalnya, pendataan di Paniai memang terasa berat bahkan nyaris dianggap mustahil. Namun, dengan kerjasama tidak kenal lelah dengan berbagai pihak, terbukti hari ini data tersebut ternyata sangat berguna. Seperti yang dikatakan oleh Eli Yogi, BANGGA Papua di Paniai memang ada untuk menjangkau yang tidak terjangkau dan melayani yang tidak terlayani. Semua demi masa depan anak Paniai yang lebih cerah.

INFORMASI LEBIH LANJUT

Untuk mendapatkan informasi lebih lanjut tentang Program BANGGA Papua dapat menghubungi info@bakti.or.id



Mendorong Langkah Serius Negara untuk Penghapusan Kekerasan Seksual di Tempat Kerja

Oleh **NABIYLA RISFA IZZATI**



Beberapa minggu ini, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) lagi-lagi mengecewakan kita karena mengeluarkan Rencana Undang-Undang (RUU) Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS) dari Program Legislasi Nasional Prioritas 2020. Kita pantas masygul, karena kasus-kasus pelecehan seksual di Indonesia bukanlah barang langka; tidak hanya di ruang publik, namun juga di lingkungan kerja. Kita masih ingat kasus Baiq Nuril yang mengalami pelecehan seksual di tempat kerjanya, namun justru dipenjara karena dituduh menyebarkan konten bermuatan asusila. Juga

kasus Rizky Amelia yang melaporkan atasannya di Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan karena pelecehan seksual, tapi justru berujung dipecat.

Kekerasan dan pelecehan seksual di lingkungan kerja semakin menjadi perhatian negara-negara di dunia. Pada Juni tahun lalu, ILO menerbitkan Konvensi Nomor 190 tentang Penghapusan Kekerasan dan Pelecehan di Dunia Kerja. Konvensi itu memuat kerangka yang jelas untuk memastikan pemenuhan hak untuk bekerja di tempat yang aman, serta mengatasi kekerasan berbasis gender dalam dunia kerja. Namun, Indonesia belum meratifikasi Konvensi ini maupun memiliki perangkat hukum yang jelas dan tegas terkait ini. Bahkan, Indonesia adalah satu-satunya negara di Asia Tenggara yang belum memiliki peraturan perundang-undangan yang spesifik mengatur tentang pelecehan seksual. Di kawasan ini hanya Indonesia, Brunei Darussalam dan Myanmar yang tidak memiliki peraturan perundangan tentang perlindungan pekerja dari pelecehan seksual di tempat kerja.

Masalah yang Mendunia

Organisasi Perburuhan Internasional (International Labour Organization, ILO) mendefinisikan pelecehan seksual di tempat kerja sebagai perilaku bersifat seksual yang tidak bisa diterima, yang membuat seseorang merasa terhina, dipermalukan dan/atau diintimidasi. Pelecehan seksual bisa terjadi dalam berbagai bentuk, mulai dari sentuhan fisik yang tidak diinginkan, hingga lontaran komentar, atau lelucon yang bersifat seksual.

Di berbagai penjuru dunia, kasus pelecehan seksual di tempat kerja telah banyak memakan korban.

Diperkirakan 30% sampai 40% perempuan pekerja di kawasan Asia-Pasifik mengalami pelecehan - menurut data 2008. Survei yang dilakukan oleh Australian Human Rights Commission pada 2018 menunjukkan bahwa 39% perempuan dan 26% laki-laki pekerja di Australia pernah mengalami pelecehan seksual di tempat kerja selama 5 tahun terakhir. Di Uni Eropa, 40% sampai 50% perempuan melaporkan telah mengalami pelecehan seksual di tempat kerja. Di Amerika Serikat, 60% perempuan juga melaporkan pernah mengalami kejadian serupa.



Upaya Pemerintah Tak Cukup

Pada akhir tahun 2019, Kementerian Ketenagakerjaan menggagas aksi #BergerakBersama dan #GerakanSayaBerani untuk membangun kesadaran masyarakat dengan harapan dapat menghentikan tindakan-tindakan amoral yang berlangsung di tempat kerja. Kementerian Ketenagakerjaan juga mendorong perusahaan untuk memiliki kebijakan internal dalam rangka pencegahan kekerasan dan pelecehan. Namun, tanpa perangkat hukum yang jelas dan tegas, kekerasan dan pelecehan di dunia kerja akan terus terjadi. Ketiadaan payung hukum untuk menangani kasus pelecehan seksual secara komprehensif seperti di Indonesia, menyebabkan perlindungan terhadap korban sulit untuk dilakukan.

Sejauh ini kita hanya memiliki Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor

SE.03/MEN/IV/2011 tentang Pedoman Pencegahan Pelecehan Seksual di Tempat Kerja. Edaran ini hanya sebatas panduan bagi pekerja, pemberi kerja, dan instansi yang bertanggung jawab pada bidang ketenagakerjaan. Pelaksanaannya juga tidak bersifat mengikat secara hukum. Indonesia adalah satu dari 387 negara yang mendukung lahirnya konvensi tentang Penghapusan Kekerasan dan Pelecehan di Dunia Kerja ILO. Akan lebih baik lagi, jika Indonesia melakukan ratifikasi Konvensi ini seiring dengan mengesahkan RUU Pencegahan Kekerasan Seksual.

Relevansi Dalam Pandemi

Konvensi ILO Nomor 190 berlaku untuk mencegah kekerasan dan pelecehan yang terjadi di tempat kerja maupun di tempat-tempat lain



Foto: ILO Asia-Pacific

yang terkait dengan pekerjaan. Lingkup perlindungan seperti ini semakin relevan mengingat hari-hari ini banyak pemberi kerja yang menerapkan pola bekerja dari rumah (*work from home*, WFH) di tengah pandemi COVID-19.

Hasil survei *Never Okay Project*, sebuah gerakan yang gencar mengampanyekan penghapusan pelecehan seksual di dunia kerja, bersama SAFEnet, perkumpulan yang fokus pada kebebasan berekspresi, pada April 2020 mengatakan bahwa praktik pelecehan seksual masih marak terjadi di Indonesia dalam masa bekerja dari rumah. Survei *online* yang melibatkan 315 responden yang bekerja dari rumah mengungkap 86 orang responden menjadi korban pelecehan seksual dan 68 responden menyaksikan pelecehan seksual. Pelakunya didominasi oleh atasan atau rekan

kerja yang lebih senior dengan menggunakan teknologi yang semestinya digunakan sebagai instrumen untuk menunjang pekerjaan, seperti konferensi video dan aplikasi pesan singkat.

Temuan ini menunjukkan bahwa pelecehan di lingkungan kerja dapat terjadi di mana saja dan tidak serta-merta hilang dengan kita bekerja dari rumah. Di tengah pandemi, sangat mungkin kasus pelecehan seksual di tempat kerja meningkat. Kantor yang menjadi lebih sepi karena adanya pembagian jadwal kerja bergiliran dapat membuka celah bagi predator untuk melaksanakan aksinya di tempat kerja. Namun, kasus-kasus pelecehan seksual ini mungkin tidak pernah muncul ke publik, karena relasi timpang antara pekerja dan pengusaha menyebabkan korban tidak berani mengungkap kasus pelecehan seksual di tempat kerjanya.

Minimnya perlindungan dari kekerasan dan pelecehan di tempat kerja tidak hanya dialami oleh pekerja formal, tetapi juga sangat mungkin dialami pekerja informal maupun pekerja yang tidak berada dalam hubungan kerja. Konvensi ILO memperhatikan hal ini juga. Konvensi ILO menasar lingkup yang luas, tidak hanya pekerja dalam hubungan formal, tetapi juga seluruh jenis pekerja apa pun status kontraknya. Bahkan, orang-orang yang masih menjalani pelatihan, pekerja magang, tenaga sukarela, dan pencari kerja pun termasuk dalam cakupan perlindungan yang dijaminatkan Konvensi ILO itu.

Langkah Nyata

Setahun berjalan sejak konvensi ini lahir, baru dua negara - Uruguay dan Fiji - yang telah meratifikasi konvensi ini. Negara sudah seharusnya mampu memastikan setiap pemberi kerja melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk melindungi pekerjanya. Langkah nyata itu dapat dimulai dengan meratifikasi Konvensi ILO Nomor 190. Kekerasan seksual adalah masalah sangat serius. Perlu payung hukum yang komprehensif untuk menjerat pelaku dan melindungi korban.

INFORMASI LEBIH LANJUT

Penulis adalah Dosen of Labour Law, Universitas Gadjah Mada.

Artikel ini bersumber dari <https://theconversation.com/mendorong-langkah-serius-negara-untuk-penghapusan-kekerasan-seksual-di-tempat-kerja-141787>

Pendekatan *Growth Diagnostics* dalam Menganalisa Pertumbuhan Ekonomi

Oleh **RISVAN RIZALDI**



emerintah dalam dokumen RPJMN 2020-2024 menentukan lima prioritas pembangunan nasional untuk lima tahun ke depan yaitu, fokus pada perbaikan kualitas dan mental sumberdaya manusia, memanfaatkan infrastruktur yang telah dibangun dan melanjutkan pembangunan untuk proyek yang sudah berjalan, birokrasi yang melayani dengan tidak rumit, cepat, dan akurat, regulasi yang tidak mempersulit, dan transformasi ekonomi. Lima isu tersebut akan menjadi prioritas agenda pembangunan nasional jangka menengah.

Lima agenda prioritas tersebut merupakan hasil dari diagnosis Kementerian PPN/Bappenas tentang kondisi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Data indikator makro ekonomi menunjukkan dalam beberapa tahun terakhir, ekonomi Indonesia tumbuh relatif stagnan pada level 5 persen, padahal jika dibandingkan dengan Era Orba, Indonesia mampu mencatat peningkatan nilai tambah rerata 7-9 persen per tahun. Kondisi ini memunculkan dua argumentasi, pertama, apakah pertumbuhan ekonomi Indonesia sudah sampai pada kondisi *golden rule*, sebuah kondisi yang digambarkan oleh Robert Solow sebagai periode stagnasi pertumbuhan akibat pemanfaatan sumber daya yang telah sampai pada titik optimum. Atau, kedua, stagnasi pertumbuhan ekonomi Indonesia saat ini bukan disebabkan oleh optimalisasi pemanfaatan sumber daya, tapi

lebih cenderung mengarah pada adanya sumbatan yang memicu kemampuan sektor riil menghasilkan nilai tambah menjadi terganggu. Hasil analisis awal pemerintah cenderung pada narasi kedua yaitu menyimpulkan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia harusnya masih bisa tumbuh di atas 5 %.

Hambatan tersebut perlu diidentifikasi lebih detail untuk menemukan kendala mengikat (*most binding constrain*) yang menjadi *trigger* pelambatan pertumbuhan ekonomi. Pemerintah, melalui Kementerian PPN/Bappenas menggunakan pendekatan yang populer dikenal dengan *Growth Diagnostics* sebagai instrumen mengidentifikasi faktor paling menghamat laju pertumbuhan. Pendekatan *Growth Diagnostics* ini pertama kali diperkenalkan oleh tiga pakar ekonomi yaitu Ricardo Hausmann, Dani Rodrik, dan Andrés Velasco melalui artikel mereka berjudul *Growth Diagnostics*. Melalui tulisannya, ketiganya memperkenalkan pendekatan baru untuk menganalisis pertumbuhan ekonomi sebuah negara secara lebih detail hingga mengerucut pada beberapa isu yang dianggap sebagai hambatan utama pertumbuhan.

Pendekatan ini dinilai sangat komprehensif karena bukan hanya multisektor (melibatkan banyak *stakeholders*), tapi juga membutuhkan beragam perangkat analisis untuk sampai pada hambatan utama. Perangkat analisis yang beragam tersebut dipakai untuk mengidentifikasi apakah sebuah isu memenuhi empat kriteria untuk disebut sebagai *most binding constrain*, yaitu *shadow price* (ongkos dari masalah tersebut sangat besar), signifikansi dari penyelesaian masalah (apakah berdampak luas atau tidak), sudah ada pelaku/*stakeholder* yang berusaha mencari jalan pintas mengatasi masalah tersebut, dan pelaku ekonomi yang terlibat dalam masalah tersebut akan sulit berkembang.

Hasil diagnosis Kementerian PPN/Bappenas dengan menggunakan kerangka *Growth Diagnostics* menemukan dua *the most binding constrain* yang menghambat

pertumbuhan ekonomi Indonesia, yaitu pertama, regulasi yang tumpang-tindih dan relatif tertutup, dan kedua adalah rendahnya kualitas institusi, terutama pada praktik koordinasi kebijakan. Selain dua isu tersebut, hasil diagnosis juga menemukan tiga masalah yang menjadi *binding constrain*, yaitu masih rendahnya ketersediaan tenaga kerja terampil, infrastruktur yang belum sepenuhnya mampu membangun konektivitas, serta rendahnya penerimaan perpajakan dan belanja negara. Temuan diagnosis ini menjadi dasar pemerintah menentukan lima agenda prioritas pembangunan jangka menengah 2020-2024, terutama pada aspek regulasi, birokrasi, dan infrastruktur.

Melihat relevansi pendekatan *Growth Diagnostics* dipakai untuk mengidentifikasi kendala utama penghambat pertumbuhan, maka pendekatan ini perlu diperluas penggunaannya ke daerah, hingga level kabupaten/kota. Pendekatan ini sangat penting bagi daerah, terutama dalam mengisi bab kerangka ekonomi makro daerah, baik pada dokumen perencanaan lima tahunan maupun tahunan. Namun, karena pendekatan ini tidak hanya mengharuskan pelibatan banyak pihak, tapi juga mensyaratkan ketersediaan data yang berkualitas. Saat ini, hampir semua daerah di Indonesia (terutama pada level kabupaten/kota), masih bermasalah dengan ketersediaan data. Andaikan pun datanya tersedia, seringkali kualitasnya masih dipertanyakan, terkhusus data yang diproduksi oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Itu sebabnya beberapa strategi dan agenda prioritas dalam dokumen perencanaan daerah seringkali tidak berkaitan dengan masalah utama, karena disusun ditengah keterbatasan dan rendahnya kualitas data.

INFORMASI LEBIH LANJUT

Penulis adalah peneliti pada Logov Celebes dan dapat dihubungi melalui email risvanrizaldi@logovcelebes.id

Artikel ini bersumber dari logovcelebes.id/opini/item/85-pendekatan-growth-diagnostics-dalam-menganalisa-pertumbuhan-ekonomi



Replikasi SAIK di Kabupaten Fakfak

Oleh **HALIA ASRIANY**

T

opografi berbukit-bukit merupakan bentuk geografis wilayah Kabupaten Fakfak. Kabupaten seluas 14.320 kilometer persegi ini dihuni oleh penduduk dengan latar belakang yang beragam selain orang asli Papua. Fakfak sebagai salah satu wilayah penghasil rempah-rempah memang sejak dulu telah didatangi oleh perantau dari berbagai wilayah di Indonesia. Satu Tungku Tiga Batu merupakan filosofi hidup masyarakat Fakfak. Tungku adalah simbol dari kehidupan, sedangkan tiga batu adalah simbol dari 'kau', 'saya' dan 'dia' yang menyatukan perbedaan baik agama, suku, status sosial dalam satu wadah persaudaraan.



Foto: Halia Asriany/Yayasan BaKTI

Sejak tahun 2017, Program Sistem Informasi dan Administrasi Kampung (SAIK) diperkenalkan dan dijalankan oleh Tim KOMPAK-LANDASAN di Provinsi Papua Barat, salah satunya adalah di Kabupaten Fakfak. Telah banyak dampak positif yang diperoleh di tingkat kampung dengan adanya SAIK ini. Di antaranya adalah manfaat dalam menyusun perencanaan kampung. Dengan adanya data, maka program kerja dapat direncanakan sesuai dengan kondisi yang ada dan dibutuhkan oleh kampung.

Salah satu kampung di Kabupaten Fakfak yang telah memanfaatkan SAIK untuk perencanaan kampung adalah Kampung Kiat yang terletak di Distrik Fakfak Barat. Kepala Kampung Kiat, Najamudin Baraweri bersama dengan aparat kampung lainnya kini bisa mengakses informasi kampung melalui ponselnya dan memantau data kampungnya dengan mudah. Pak Najamudin pulalah yang menularkan manfaat ini kepada sejumlah

kampung di sekitarnya seperti Kampung Werba Utara yang mulanya belum mengetahui manfaat dari data SAIK. Selain untuk perencanaan dan administrasi penduduk, di masa pandemi COVID-19, data SAIK juga dimanfaatkan sebagai salah satu alat verifikasi untuk menentukan data penerima bantuan sosial.

Kini Kampung Kiat bersama dengan 14 kampung lainnya di Distrik Pariwari dan Distrik Fakfak Barat tengah melakukan proses pemutakhiran data dari SAIK menuju SAIK+. Pada SAIK+ akan ada penambahan variabel data yang dibutuhkan oleh pemangku kepentingan, terutama untuk agregasi data Orang Asli Papua (OAP). Tujuannya agar dapat membuat perencanaan yang menyesuaikan dengan kondisi penduduk dalam suatu wilayah. Selain itu, SAIK+ juga memungkinkan pemerintah daerah untuk mengintegrasikannya dengan sistem informasi elektronik lainnya di daerah dan memungkinkan pula pemerintah daerah untuk memodifikasi fitur aplikasi sesuai kebutuhan daerah di masa yang akan datang. Proses pemutakhiran data menuju SAIK+ ini dilakukan sendiri oleh kader-kader yang ditunjuk oleh kampung didampingi tim KOMPAK-LANDASAN yang ada di Kabupaten Fakfak.

Menyadari pentingnya data, Pemerintah Kabupaten Fakfak kini telah menyiapkan program replikasi SAIK di 15 distrik lainnya di Kabupaten Fakfak. Mengawali replikasi tersebut, Kabupaten Fakfak menggelar kegiatan Pelatihan Sistem Administrasi dan Informasi Kampung (SAIK) untuk distrik dan kelurahan di Kabupaten Fakfak pada tanggal 14 Juli 2020.

“Selama ini data kita tumpang tindih. Ini terutama kita lihat ketika menentukan penerima bantuan sosial. Di sini kita bisa menyadari bahwa memang ada yang salah dengan sistem pendataan kita. Dari sini kita juga jadi semakin yakin bahwa perlu adanya SAIK di seluruh kampung.” Ungkap Sekretaris Daerah Kabupaten Fakfak, Ali Baham Tomongmere dalam sambutannya. “Dua distrik di Kabupaten Fakfak telah menikmati manfaatnya dan kita tinggal mengembangkannya. Kalau data semua kampung sudah lengkap, akan sangat mudah bagi kita menentukan program kerja yang tepat nantinya mulai dari tingkat kampung sampai kabupaten,” tambahnya.



Pelatihan ini diikuti oleh seluruh perwakilan distrik dan kelurahan di Kabupaten Fakfak. Diikuti pula oleh BAPPEDA Provinsi Papua Barat serta tim dari KOMPAK-LANDASAN secara daring. Pada kegiatan ini, para peserta memperoleh penjelasan tentang SAIK dan tata cara pelaksanaannya. Kehadiran BAPPEDA Provinsi Papua Barat sendiri untuk mensosialisasikan Program Strategi Peningkatan Pembangunan Kampung-Otonomi Khusus (PROSPPEK OTSUS). PROSPPEK OTSUS ini adalah program pemerintah Provinsi Papua Barat untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pembangunan di kampung dan distrik dalam bidang ekonomi dan pelayanan dasar yang dikhususkan bagi Orang Asli Papua (OAP). PROSPPEK OTSUS sendiri berupa bantuan keuangan bagi kampung dan distrik untuk mencapai tujuan tersebut. Seluruh kabupaten di Provinsi Papua Barat menjadi sasaran dalam program ini, tak terkecuali Kabupaten Fakfak.

PROSPPEK OTSUS ini akan berfokus pada empat sasaran yang mencakup (1) penguatan Sistem Informasi dan Administrasi Kampung; (2) peningkatan kapasitas kader dan aparatur pemerintah kampung; (3) penguatan distrik dalam melaksanakan BINWAS terhadap kampung; serta (4) penguatan sinergi bidang pembangunan di kampung.

Penguatan Sistem Administrasi dan Informasi Kampung pada program PROSPPEK OTSUS ini dimaksudkan untuk menunjang tujuan utama dari program ini yaitu meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pembangunan di kampung dan distrik dalam bidang ekonomi dan pelayanan dasar



yang dikhususkan bagi OAP. Sebagaimana diungkap oleh Legius Wanimbo (Kepala Bidang Perencanaan Otonomi Khusus Bappeda Provinsi Papua Barat) dalam penjelasannya mengenai PROSPPEK OTSUS, “Dengan PROSPPEK OTSUS ini, kita akan fokus kepada OAP yang datanya akan kita peroleh melalui SAIK+. Dengan demikian, semua data akan terintegrasi dengan berbagai pihak seperti BPS, Dinas Sosial, Dukcapil dan lainnya untuk memaksimalkan pencapaian dari PROSPPEK OTSUS.”

Dengan adanya SAIK yang kini tengah dimutakhirkan dengan SAIK+ yang memuat penambahan variabel data yang dibutuhkan oleh pemangku kepentingan, terutama data Orang Asli Papua, memang sejalan dengan program PROSPPEK OTSUS tersebut. Program ini telah memiliki pedoman pelaksanaan di tingkat Provinsi Papua Barat periode 2020-2022 yang



Foto-foto: Halia Asriany/Yayasan BaKTI



siap untuk dijalankan di seluruh kabupaten di Provinsi Papua Barat. Kabupaten Fakfak sendiri telah memulainya dengan Sosialisasi PROSPPEK OTSUS dan Pelatihan Sistem Administrasi dan Informasi Kampung (SAIK).

Setelah selesai dengan Pelatihan Sistem Administrasi dan Informasi Kampung (SAIK) untuk distrik dan kelurahan di Kabupaten Fakfak, selanjutnya para kepala distrik dan kelurahan akan melakukan sosialisasi mengenai SAIK ke seluruh kampung dan kelurahan di Kabupaten Fakfak. Setelah itu dilanjutkan dengan menunjuk kader kampung yang akan melakukan proses pendataan dan penginputan data ke dalam aplikasi SAIK. Semua proses ini akan berjalan didampingi oleh tim KOMPAK-LANDASAN melalui koordinator kabupaten dan koordinator distrik yang ada.

Terinstitusionalkannya Program SAIK ini juga adalah sebuah capaian tersendiri bagi

KOMPAK-LANDASAN yang telah bekerja sejak tahun 2017 untuk menciptakan sistem administrasi dan informasi kampung di Papua Barat. Sebagaimana tujuan dari Program KOMPAK-LANDASAN yaitu meningkatkan akses masyarakat di Papua terhadap pelayanan dasar (kesehatan & pendidikan) yang berkualitas, dengan adanya sistem pendataan yang terintegrasi, maka tujuan tersebut dapat dicapai dengan maksimal.

Dengan replikasi SAIK ini, maka 142 kampung dan 7 kelurahan di Kabupaten Fakfak akan memiliki sistem informasi dan administrasi kampung yang lengkap dan terintegrasi. Dengan data ini, pembangunan akan dapat dilakukan dengan tepat sasaran sesuai kebutuhan kampung, distrik maupun kabupaten. Kampung pun dapat mengelola sistem administrasi dan informasi secara mandiri untuk keperluan pemerintahan dan pembangunan kampung.

“Ini bentuk keseriusan pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat asli Papua di tanah Papua yang kita cintai,” Ungkap Sekda Kabupaten Fakfak. Tak lupa beliau menyampaikan terima kasih untuk Program KOMPAK-LANDASAN yang telah mendampingi proses pembentukan SAIK hingga saat ini memasuki program pemutakhiran menjadi SAIK+ yang menyadarkan pemerintah akan pentingnya data dan administrasi kependudukan.

INFORMASI LEBIH LANJUT

Untuk mendapatkan informasi lebih lanjut tentang Program KOMPAK-LANDASAN Fase II, dapat menghubungi info@bakti.or.id



Kekerasan terhadap Perempuan di Masa Pandemi

Oleh **M. GHUFRAN H. KORDI K.**

Pandemi COVID-19 (*Coronavirus disease*), penyakit disebabkan oleh virus SARS CoV-2 mengubah kehidupan sosial masyarakat di seluruh dunia. Masyarakat diminta untuk menjaga jarak (*physical distancing*), menggunakan masker, melakukan pembatasan sosial (*social distancing*), dan bekerja di rumah (*work from home*).

Dengan cara tersebut, penyebaran COVID-19 dapat dicegah di tengah kerja keras pada ahli menemukan vaksin. Penemuan dan penggunaan vaksin adalah cara efektif untuk penanggulangan penyakit ini, namun dibutuhkan waktu dan biaya untuk menghasilkan vaksin. Karena itu, dibutuhkan kesadaran masyarakat untuk memutus rantai penyebaran COVID-19.

Kehidupan Domestik dan Kekerasan

Sejak mewabahnya COVID-19, masyarakat diminta untuk melakukan berbagai kegiatan di rumah. Menjadi orang rumahan dengan menghindari kerumunan, adalah cara efektif untuk memutus penyebaran COVID-19. Jadilah sebagian besar manusia sebagai pekerja di rumah atau pekerja domestik. Kata 'domestik' berasal dari kata Latin *domus* yang berarti 'rumah', jadi manusia adalah makhluk yang hidup di dalam rumah atau terdomestikasi.



Sosialisasi Panduan di beberapa daerah di Tana Toraja dan Kota Ambon. Foto : Lenynda & Jemy Talakua

Selama ini istilah domestik, ruang domestik, dan pekerja domestik ditujukan kepada perempuan. Ketika dihubungkan dengan pekerjaan, maka pekerja domestik dianggap sebagai kerja rendahan atau bukan pekerjaan, sehingga dibayar murah. Karenanya istilah pembantu rumah tangga atau asisten rumah tangga masih selalu digunakan dibandingkan istilah pekerja rumah tangga (PRT).

Kegiatan-kegiatan non biologis, seperti memasak, mencuci piring, mencuci pakaian, merawat rumah, menjaga anak, dan sebagainya dianggap sebagai pekerjaan domestik, dan merupakan pekerjaan perempuan di dalam rumah.

Ketika seorang perempuan melakukan pekerjaan yang sama di luar rumah (di rumah orang lain), bahkan melintasi negara, seperti yang dilakukan oleh Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di berbagai negara, tetap dianggap sebagai pekerja domestik. Sementara pekerjaan yang sama, ketika dilakukan oleh seseorang di ruang publik, misalnya di hotel, maka pekerja tersebut dikategorikan sebagai karyawan atau pegawai hotel.

Penggunaan istilah “pekerja domestik”, “pembantu”, “asisten” dan istilah-istilah lain yang bias bukanlah secara kebetulan, melainkan ekspresi dari diskriminasi terhadap perempuan.

Sementara diskriminasi menempatkan perempuan pada posisi lebih rendah dari laki-laki. Diskriminasi terhadap perempuan telah berurat akar di dalam masyarakat patriarki, sehingga berbagai perlakuan buruk terhadap perempuan dan anak, seperti kekerasan dianggap sebagai sesuatu yang biasa, bahkan dilestarikan oleh sistem dan struktur di dalam masyarakat dan negara.

Pandemi COVID-19 yang memaksa manusia menjadi manusia rumahan atau manusia domestik, ternyata menimbulkan masalah bagi sebagian perempuan. Kekerasan terhadap perempuan meningkat ketika pelaku kekerasan (laki-laki) “dirumahkan” oleh COVID-19. Selama pandemi (Maret-Juli) terjadi 14.719 kasus kekerasan terhadap perempuan. Dari total kasus tersebut, kekerasan fisik mencapai 5.448 kasus, kekerasan psikis sebanyak 2.123 kasus, dan kekerasan seksual mencapai 4.898 kasus. Sedangkan kekerasan ekonomi dan kekerasan khusus terhadap buruh migran dan trafficking (*trafficking*) masing-masing mencapai 1.528 kasus dan 610 kasus. Dari jumlah kasus tersebut, terjadi di tiga ranah, yaitu ranah personal sebesar 11.105 kasus atau 75,4 %, ranah komunitas 3.602 kasus atau 24,4 % dan ranah negara 12 kasus atau 0,08 %.

Protokol Penanganan Korban

Menurut P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak) dan Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) terjadi peningkatan kasus kekerasan terhadap perempuan sebesar 75% sejak pandemi COVID-19. Ini menunjukkan bahwa lingkungan rumah menjadi tidak aman bagi perempuan dan anak selama Pandemi COVID-19.

Di tengah meningkatnya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, penanganan korban tidak mudah dilakukan. Apalagi lembaga layanan yang ada belum berpengalaman menangani korban dalam kondisi pandemi. Ketakutan petugas dalam berinteraksi dengan korban, maupun ketiadaan fasilitas menyebabkan korban tidak mudah dijangkau. Ditambah dengan sebagian korban yang tidak menjaga jarak dan tidak menggunakan masker ketika mendatangi lembaga layanan.

Beberapa lembaga layanan berinisiatif membuat standar penanganan korban di tengah pandemi pun tidak mudah dijalankan karena terhambat berbagai faktor, salah satunya tidak ada rujukan dari pusat dan tidak ada pengalaman lembaga yang menangani korban dalam suasana pandemi, terutama dalam menjaga jarak dan pembatasan sosial.

Namun, pengalaman-pengalaman yang terbatas dari bulan Maret-April 2020 mulai menjadi dasar Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mengembangkan Protokol Penanganan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan di Masa Pandemi COVID-19. Protokol ini mulai disosialisasikan dan diujicobakan pada Juli 2020 di beberapa daerah di Indonesia, termasuk atas dukungan Program MAMPU.

Program MAMPU-BaKTI melakukan sosialisasi panduan dan uji coba di Makassar, Maros, Parepare, Tana Toraja, dan Ambon. Sosialisasi dan uji coba panduan tersebut akan membantu tenaga layanan dalam penanganan korban kekerasan di lapangan dalam kondisi pandemi.

Tantangan di Lapangan

Dari beberapa pengalaman lapangan dan uji coba panduan di wilayah-wilayah tersebut,

beberapa kondisi yang menjadi tantangan sebagai berikut. Pertama, sulitnya penjangkauan terhadap korban yang melapor secara daring. Laporan kekerasan terhadap perempuan dan anak secara daring mengalami peningkatan, namun lembaga layanan mengalami keterbatasan dalam menjangkau korban, baik karena terbatasnya sumber daya untuk menjemput korban, maupun terbatasnya rumah aman atau shelter untuk menampung korban.

Lembaga-lembaga layanan yang ada tidak mempunyai ruangan yang cukup untuk menampung korban, apalagi harus diterapkan protokol kesehatan, sehingga ruangan dan fasilitas yang tersedia tidak cukup menampung korban.

Kedua, tidak efektifnya konseling yang dilakukan secara daring. Karena harus menjaga jarak dan pembatasan sosial, maka konseling dilakukan secara daring. Namun, konseling ini tidak selalu efektif karena beberapa korban tidak berkomunikasi secara mandiri dengan konselor, melainkan bersama keluarga. Bahkan pada beberapa kasus bukan korban yang menyampaikan permasalahannya kepada konselor, tetapi oleh orang tua atau keluarga yang berada di dekatnya.

Ketiga, biaya penanganan korban mengalami pembengkakan, karena pembatasan sosial. Penanganan korban harus menerapkan protokol kesehatan, sementara korban tidak selalu sadar dengan pembatasan sehingga ada korban yang mendatangi lembaga layanan tanpa menggunakan masker dan tidak menjaga jarak. Di sisi lain, belum alokasi anggaran yang diperuntukkan untuk kebutuhan-kebutuhan yang berhubungan dengan penerapan protokol kesehatan.

Namun demikian, penerbitan dan sosialisasi Protokol Penanganan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan di Masa Pandemi COVID-19, ini akan sangat membantu lembaga layanan di daerah untuk meningkatkan layanan korban kekerasan di masa pandemi ini, tentu disesuaikan dengan kondisi lokal di daerah masing-masing.

INFORMASI LEBIH LANJUT

Untuk mendapatkan informasi lebih lanjut tentang Program MAMPU-BaKTI, dapat menghubungi info@bakti.or.id

PERAN AYAH DALAM ASI EKSKLUSIF PENTING: 2 HAL YANG BISA DILAKUKAN PEMERINTAH

Oleh
ANGGA SISCA RAHADIAN & LENGGA PRADIPTA

Pentingnya peran ayah dalam pemberian air susu ibu (ASI) eksklusif tidak dapat diabaikan. Sebagai sosok yang paling dekat dengan ibu, banyak hal yang dapat ayah lakukan untuk mendukung ibu selama menyusui.

Bentuk dukungan yang bisa dilakukan di antaranya membantu mengurus bayi selama ibu menyusui dan mengatasi berbagai permasalahan selama proses menyusui. Akan tetapi, peran Ayah dalam membantu ibu menyusui kerap kali diabaikan di Indonesia.

Salah satu penyebabnya adalah nilai-nilai patriarki yang masih dianut oleh masyarakat Indonesia. Pandangan bahwa mengurus anak, termasuk masalah menyusui, hanya tanggung jawab perempuan masih kuat di masyarakat Indonesia sehingga membuat para ayah sulit untuk mendukung ibu yang sering kali menghadapi masa-masa sulit selama menyusui.

Selama proses menyusui, tidak sedikit ibu yang mengalami sindrom *baby blues* karena mereka harus berjuang tidak hanya memenuhi kebutuhan ASI anaknya tapi juga kebutuhan-kebutuhan anak yang baru lahir yang seakan tidak pernah usai.

Sindrom tersebut juga membuat ibu yang baru saja melahirkan sering merasa sedih dan suasana hati menjadi berantakan. Apabila tidak segera diobati dengan tepat kemungkinan ibu tersebut bisa mengalami depresi.



Foto: ANTARA/Akbar Nugroho Gumay/ss/Spt/11

Di Indonesia, ketidakhadiran ayah selama proses menyusui dianggap wajar. Meski studi menunjukkan keterlibatan ayah berdampak positif terhadap keberhasilan ASI eksklusif. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mendefinisikan ASI eksklusif sebagai asupan ASI yang diberikan kepada bayi baru lahir tanpa tambahan makanan atau minuman apa pun kecuali vitamin sampai pada usia 6 bulan.

ASI eksklusif tidak hanya memiliki manfaat untuk kesehatan ibu dan bayi namun juga memiliki manfaat ekonomi untuk keluarga dan juga negara. Keluarga, terutama yang berasal dari ekonomi menengah ke bawah, tidak perlu membeli susu formula yang menelan biaya tidak sedikit. Selain itu, ASI eksklusif juga bermanfaat untuk mengurangi angka kematian dan risiko penyakit.

Setidaknya terdapat dua hal penting bagi para pembuat kebijakan untuk mendorong ayah turut serta menyukseskan program ASI eksklusif.

Pertama, Meningkatkan Kesadaran Masyarakat

Pemerintah dapat bekerja sama dengan berbagai komunitas pendukung ASI untuk terus

meningkatkan kesadaran masyarakat bahwa menyusui itu bukan hanya tugas dari ibu.

Di Indonesia sudah ada komunitas ayah pendukung ASI di mana didirikan oleh para ayah. Komunitas tersebut dikenal dengan Ayah ASI Indonesia.

Dengan menggunakan berbagai kanal media sosial (Twitter dan Instagram), komunitas tersebut konsisten meningkatkan pengetahuan ASI masyarakat. Mereka memberikan informasi dari sumber tepercaya sehingga dapat menghalau mitos-mitos keliru terkait menyusui yang banyak beredar. Selain itu, mereka juga menjawab berbagai pertanyaan pengikut mereka di media sosial sekaligus selalu mendorong para ayah untuk terlibat aktif dalam aktivitas pengasuhan anak, termasuk menyusui.

Upaya yang dilakukan oleh komunitas ini untuk meningkatkan kesadaran masyarakat khususnya masyarakat di daerah perkotaan cukup efektif.

Sementara itu, untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya peran ayah dalam proses menyusui bagi mereka yang berada di daerah terpencil, pemerintah perlu menguatkan peran pusat kesehatan masyarakat (Puskesmas).

Di Spanyol, ayah diizinkan untuk memiliki izin cuti sampai dengan 16 minggu, sedangkan di Vietnam para ayah yang baru memiliki anak berhak mendapatkan izin cuti sampai dengan 14 hari.

Puskesmas di daerah umumnya memberikan pelatihan terkait masa kehamilan, kelahiran bayi, sampai proses menyusui. Pelatihan tersebut dipandu oleh seorang konselor menyusui yang sebelumnya telah berpengalaman dalam permasalahan kehamilan dan menyusui.

Kedua, Memastikan Masyarakat Mengetahui Tentang Pemberian “Cuti Ayah”

Indonesia belum sepenuhnya paham dengan cuti ayah yakni cuti yang diperoleh oleh ayah yang baru memiliki bayi.

Regulasi Ketenagakerjaan di Indonesia hanya memberikan izin cuti selama 2 hari untuk ayah yang baru memiliki buah hati, dan izin ini biasanya diberikan agar ayah bisa menemani istrinya ketika masa persalinan.

Di Spanyol, ayah diizinkan untuk memiliki izin cuti sampai dengan 16 minggu, sedangkan di Vietnam para ayah yang baru memiliki anak berhak mendapatkan izin cuti sampai dengan 14 hari.

Di beberapa negara maju, ayah bahkan diperbolehkan mendapatkan izin cuti lebih dari 18 minggu.

Banyak Manfaat yang Didapatkan Ayah Jika Mereka Mendapatkan Cuti Ayah.

Para ayah bisa membangun hubungan erat dengan bayi mereka yang baru lahir. Mereka juga bisa memberikan dukungan kepada ibu dan juga mengetahui perkembangan bayi mereka. Yang tentu saja akan mensukseskan ASI eksklusif.

Memiliki waktu untuk cuti sementara dari pekerjaan dan lebih banyak meluangkan waktu di rumah juga membuat ayah bisa membantu

pekerjaan rumah tangga (domestik) misalnya dengan memasak makanan sarat gizi bagi istri yang baru melahirkan, memandikan bayi, serta mengganti popok bayi.

Akan tetapi, sampai saat ini Undang-Undang (UU) Ketenagakerjaan Indonesia belum mengatur tentang cuti ayah, walaupun dalam UU Kesehatan tahun 2009 sudah dengan jelas menyatakan bahwa setiap anak berhak mendapatkan ASI eksklusif setidaknya dalam 6 bulan pertama sejak kelahirannya.

Regulasi ini seharusnya bisa mendorong pemerintah, masyarakat dan keluarga, terutama ayah untuk dapat memberikan dukungan kepada ibu melalui perhatian dan fasilitas yang memadai. Hal ini menjadi sangat krusial bagi Indonesia untuk segera membuat regulasi tentang cuti ayah

Perempuan Butuh Dukungan

Peran ayah dalam mendukung ibu menyusui sangat krusial, baik dukungan fisik maupun psikis.

Dukungan fisik bisa dilakukan dengan cara membantu pekerjaan domestik atau menemani ibu ketika mereka harus terjaga pada malam hari. Dukungan psikis dapat berupa memastikan kondisi ibu tenang dalam menghadapi tantangan-tantangan yang muncul sehingga pemberian ASI eksklusif bisa tercapai.

Semua pihak perlu mendukung proses menyusui ibu dengan cara meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya peran ayah dalam mendukung ibu selama proses menyusui. Memahami betapa pentingnya proses menyusui untuk menciptakan generasi penerus bangsa, dapat dilakukan dengan cara mendukung pembuat kebijakan untuk memberikan cuti ayah, jadi para ayah bisa memberikan dukungan sepenuhnya kepada ibu ketika masa menyusui.

INFORMASI LEBIH LANJUT

Angga Sisca Rahadian, Peneliti LIPI

Lengga Pradipta, Peneliti LIPI

Artikel ini bersumber dari: <https://theconversation.com/peran-ayah-dalam-asi-eksklusif-penting-2-hal-yang-bisa-dilakukan-pemerintah-144361>



Bersama Cegah Penyebaran COVID-19 di Kabupaten Nagekeo

Oleh
Rosadlima Dee Panda

Permasalahan pandemi COVID-19 menjadi permasalahan semua pihak. Para tenaga kesehatan membutuhkan dukungan semua warga masyarakat dalam menjaga agar kurva kasus menurun. Dalam rangka pencegahan penyebaran COVID-19 di Kabupaten Nagekeo, Yayasan WISE-WASH in Southeast Asia (WISE) berinisiatif melakukan penggalangan dana sejak bulan Maret 2020.

Kabupaten Nagekeo sendiri merupakan kabupaten yang terbentuk di 2007 dengan sebuah rumah sakit umum yang diresmikan di 2017. Rumah Sakit Aeramo di awal



Foto: Rosadelima Dee Panda

pandemi masih belum siap untuk menampung pasien COVID-19 karena keterbatasan fasilitas juga alat pelindung diri.

Pada awalnya, ada kekhawatiran bahwa *crowdfunding* yang dilakukan akan membuat panik karena belum ada kasus penyebaran di Nusa Tenggara Timur waktu itu. Namun karena kekhawatiran akan persebaran berbagai kasus yang terjadi di daerah-daerah lain dan kesadaran akan minimnya fasilitas kesehatan yang memadai di Kabupaten Nagekeo maka inisiatif tersebut terus dijalankan.

Komunikasi pun dilakukan dengan pimpinan daerah dan komunitas dan organisasi

lain untuk melakukan koordinasi mengenai kebutuhan masyarakat dan tenaga kesehatan di Kabupaten Nagekeo. Dalam diskusi bersama Bupati Nagekeo sebagai Ketua Posko COVID-19 (25/3/2020), beliau mendukung kegiatan organisasi-organisasi, komunitas dan BUMN terkait langkah bersama dalam penanganan COVID-19. Inisiatif dan kegiatan WISE tersebut mendapat dukungan beberapa organisasi masyarakat lainnya seperti Yayasan Sao Mere, Forum Pencegahan dan Penanggulangan Bencana (Forum PRB Nagekeo), ibu-ibu Dharma Wanita Kabupaten Nagekeo dan juga komunitas anak muda baik kelompok dan perorangan.

Bantuan pun berdatangan baik dari WISE dan donatur lainnya. Dukungan materi datang baik melalui perseorangan (*crowdfunding*) juga kerja sama antar lembaga seperti *The Atlantis Scholarship Grant* yang melalui program *call for proposal* dengan teman-teman alumni *The Atlantis*. WISE dipercaya untuk melakukan pengelolaan dana dan memberikan bantuan sesuai kebutuhan Puskesmas. Kemudian kerja sama juga dilakukan dengan *The Fashion Pulpit* melalui Program *Fashion Online Swap* dan donatur individu lainnya. Termasuk beberapa teman-teman pemuda sukarelawan baik di Nagekeo maupun di Jakarta yang membantu dalam hal koordinasi pembelian juga membantu distribusi sampai ke Nagekeo. Yayasan WISE yang bergerak di bidang air, sanitasi dan lingkungan terbilang masih muda dan baru di Nagekeo, sehingga sangat mengapresiasi kerja-kerja kolaborasi dan dukungan dari berbagai pihak.

Program awal yang dilakukan pada bulan Maret adalah pemasangan tangki air di tempat-tempat umum terutama di pasar, terminal dan di rumah sakit. Hal ini dilakukan agar masyarakat terutama penjual dan pembeli dapat memanfaatkan untuk melakukan cuci tangan.

Bantuan Alat Pelindung Diri (APD) disalurkan secara terpusat di Posko COVID Nagekeo yang disalurkan ke posko-posko perbatasan juga rumah sakit seperti masker, *face shield*, sarung tangan dan *nurse cup* pada bulan April 2020. Namun sayang, pada bulan Mei kemarin beberapa barang sumbangan raib terbakar karena musibah kebakaran pada dua ruangan farmasi rumah sakit Kabupaten



Nagekeo. Tidak perlu waktu lama karena kemudian banyak bantuan dari berbagai pihak yang masuk ke Rumah Sakit Nagekeo, termasuk dari donasi teman-teman WISE. Hal ini sangat luar biasa sekali, terlihat jelas bagaimana masyarakat dan organisasi lainnya bekerja sama dalam memberikan bantuan terutama ketika dibutuhkan di seluruh area di Indonesia.

Berdasarkan kebutuhan komunitas dan masyarakat, masker kain juga menjadi salah satu kebutuhan dalam menjalankan protokol kesehatan selama pandemi berlangsung. Gerakan menjahit masker diinisiasi oleh ibu Ketua Penggerak PKK Kabupaten Nagekeo bersama ibu-ibu lainnya yang memiliki keterampilan menjahit. Untuk mendukung gerakan tersebut maka WISE bersama dengan Yayasan Sao Mere memberikan donasi kain untuk dijahitkan masker. Selain itu, secara mandiri beberapa penjahit juga bekerja sama menjahitkan masker. Kain dan karet dibeli di Kupang dan Maumere karena persediaan di

Kabupaten Nagekeo masih sedikit. Untuk mengapresiasi kerja bapak ibu penjahit maka masker juga dibeli Rp.3000 per masker.

Beberapa masker disalurkan untuk komunitas dan organisasi yang aktif berkegiatan seperti *Trash Hero* Nagekeo (50 buah), Taman baca anak-anak Komunitas Mata Leza (50 buah), kelompok petani (115 buah), Forum Pencegahan dan Penanggulangan Bencana (35 buah), dan Posko Kesehatan (125 buah). Selain itu, yayasan juga bekerja sama dengan salah satu anggota DPR yang turut menyumbang biaya menjahit masker untuk dibagikan ke masyarakat umum sebanyak 500 buah.

Minggu lalu bantuan paket pencegahan penyebaran COVID-19 kembali disalurkan. Kali ini langsung ke 7 Puskesmas di 7 kecamatan di Kabupaten Nagekeo. Bantuan disalurkan secara terpisah ke Puskesmas Danga dan Puskesmas Wolowae pada tanggal 30 July 2020, Puskesmas Jawakisa, Boawae dan Mauponggo (4 Agustus 2020) dan juga Puskesmas Nangaroro dan



Puskesmas Keo Tengah (5 Agustus 2020). Adapun bantuan yang dibagikan berupa masker bedah 100 buah/box(28 box), sarung tangan steril 85 buah, sarung tangan non steril 50 buah/box (10 box), *nurse cup* 19 box, thermo gun 2 lembar dan sabun cuci tangan 15 liter untuk masing-masing Puskesmas. Selain itu, Yayasan juga memberikan apresiasi kepada bapak dan ibu *cleaning service* Puskesmas dan sanitarian dengan memberikan seragam dan sepatu boot untuk tim sanitarian. Bantuan tersebut diharapkan dapat menekan angka penyebaran COVID-19 dan mendukung kerja tenaga kesehatan di Puskesmas dan masyarakat.

Memasuki masa adaptasi kebiasaan baru ini, komitmen untuk terus melawan COVID-19 terus digalakkan melalui pelaksanaan protokol kesehatan baik di tempat umum dan sehari-hari. Memang dibutuhkan kesadaran semua pihak untuk tetap menerapkan protokol kesehatan di tengah masa kejenuhan akibat wabah sehingga masyarakat cenderung lalai. Untuk itu

Ragam aktivitas yang dilakukan oleh Yayasan WISE-WASH di Kabupaten Nagakeo, dari distribusi masker untuk kelompok petani dan komunitas aktif, pemberian bantuan paket hazmat untuk RSUD Aeramo, penempatan sarana cuci tangan pakai sabun, hingga penyebaran poster untuk penanggulangan COVID-19.

Foto : Dok. Yayasan WISE-WASH

diperlukan keterlibatan lebih banyak orang muda.

Yayasan bekerja sama dengan beberapa youtuber memberikan iklan layanan masyarakat melalui akun YouTube yang dikelola orang muda sehingga dapat meningkatkan kesadaran untuk tetap melaksanakan protokol kesehatan. Harapannya bahwa semua merasa terlibat dan bertanggung jawab sehingga tidak terjadi penyebaran kasus COVID-19 yang tidak dapat tertangani.

INFORMASI LEBIH LANJUT

Penulis adalah Staf Yayasan WISE dan Alumni Program INSPIRASI.

Penulis dapat dihubungi melalui email rosadepanda@washinseasia.org



Posyandu Prakonsepsi untuk Generasi Emas

Oleh **Anang S. Otoluwa**

Posyandu Prakonsepsi di Banggai lahir dalam usaha menjawab berbagai masalah kronis serius di Indonesia Pertama, angka kematian ibu (AKI) yang masih tinggi: 359/100.000 (BPS, 2012). Kedua, anak balita dengan tubuh pendek atau stunting mencapai 37,2 % (Balitbangkes, 2013). Ketiga, penyakit tidak menular (PTM) kini mendominasi penyebab kematian di Indonesia, yakni 59,5% (Balitbangkes, 2007).

Di Kabupaten Banggai kondisinya tidak jauh berbeda. Kematian ibu pada 2014 terjadi 15 kasus, atau 267/100.000 (Dinkes, 2015). *Stunting* berdasarkan riset kesehatan dasar 2013 sejumlah 35,4% dan pada tahun 2018 sejumlah 31,8%.

Penyebab kematian ibu terbanyak di Kabupaten Banggai adalah perdarahan (40%). Ini terkait dengan

anemia defisiensi besi (Depkes, 2007). Penyebab lainnya adalah preeklampsia/eklampsia (20%) yang berhubungan dengan asupan vitamin dan mineral antioksidan ibu hamil (Mistry, 2014). *Stunting* sangat terkait dengan gangguan pertumbuhan janin di dalam kandungan atau IUGR (Christian, P., 2013), sementara kejadian penyakit tidak menular terkait dengan keadaan gizi saat bayi di dalam kandungan (Barker, 2012). Akar penyebab semua permasalahan adalah kekurangan gizi pada ibu hamil. Karena itu, untuk menurunkan AKI, *stunting*, serta kejadian PTM, maka kegiatan harus difokuskan pada perbaikan gizi ibu hamil. Berbagai upaya memang telah dilakukan untuk itu. Sebagai misal, program keluarga sadar gizi dan pemberian suplemen tablet besi pada ibu hamil. Namun demikian, hasilnya belum memuaskan. Anemia pada ibu hamil di Indonesia tetap tinggi: 37,1% (Balitbangkes, 2013),



Foto: Yusuf Ahmad/BASICS

demikian pula kematian ibu terus bertambah. Jika demikian, apa yang harus dilakukan?

Inovasi Posyandu Prakonsepsi

Pelaksanaan Posyandu Prakonsepsi mengacu pada Peraturan Presiden No. 42, Tahun 2013 tentang gerakan nasional percepatan perbaikan gizi pada 1000 Hari Pertama Kehidupan, Tanggal 23 Mei 2013. Tujuan Posyandu Prakonsepsi ini adalah menurunkan angka kematian ibu dari 279/100.000 menjadi 80/100.000 kelahiran hidup. Menurunkan prevalensi *stunting* dengan target 28% persen pada 2019.

Sebagai sebuah gerakan baru, maka dibutuhkan peran lintas sektor serta dukungan masyarakat. Oleh karena itu kegiatan ini dimulai dengan advokasi

kepada *stakeholders* tingkat kabupaten, kecamatan, dan selanjutnya tingkat desa. Layaknya Posyandu bagi ibu hamil dan anak balita, maka kegiatan ini dilakukan oleh masyarakat dengan bantuan teknis bidan/tenaga kesehatan di desa. Kegiatan intinya adalah sebagai berikut:

1. Rekrutmen Wanita Prakonsepsi

Ada 2 cara rekrutmen pada pelaksanaan Posyandu Prakonsepsi. Pertama melalui KUA. Dilakukan kerja sama dengan KUA di kecamatan. Wanita calon pengantin yang mendaftar di KUA untuk melaksanakan kursus calon pengantin dicatat. Kemudian pada saat kursus calon pengantin, mereka diberi penyuluhan oleh petugas gizi dan bidan Puskesmas tentang kesehatan reproduksi dan gizi ibu hamil. Setelahnya KUA memberikan surat pengantar ke puskesmas untuk mendapatkan pemeriksaan kesehatan yang terdiri dari pemeriksaan kadar hemoglobin, pengukuran antropometri, pemeriksaan protein urin, pemberian suntikan TT, serta diberikan tablet tambah darah/kapsul multi gizimikro. Sesudahnya mereka akan dirujuk ke bidan desa tempat mereka berdomisili untuk mendapatkan pelayanan prakonsepsi selanjutnya. Kedua melalui pendataan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (PIS-PK). Setiap Pembina Keluarga (PK) mendaftarkan pasangan usia subur yang ada dalam 100 KK binaannya. Data Pasangan Usia Subur (PUS) kemudian dipisah dan dikelompokkan menjadi data 'PUS Yang menggunakan alat kontrasepsi', "Yang sedang hamil" serta sisanya adalah data "Wanita Prakonsepsi". Mereka diundang untuk mendapatkan sosialisasi terkait posyandu prakonsepsi. Selanjutnya mereka didaftar menjadi peserta kelas wanita prakonsepsi.

2. Kelas Wanita Prakonsepsi

Ini mirip dengan kelas ibu hamil. Calon ibu hamil bertemu sebulan sekali, lalu di kelas ini dilaksanakan kegiatan penyuluhan kesehatan reproduksi dan gizi dalam mempersiapkan kehamilan sehat.

3. Pengukuran Antropometri

Dimaksudkan untuk mengetahui status gizi calon ibu hamil berdasarkan tinggi dan berat badan. Mereka yang mengalami kekurangan maupun kelebihan akan diberikan penyuluhan untuk mencapai status gizi yang ideal. Namun jika status gizi yang ideal belum sempat dicapai hingga konsepsi terjadi, maka status gizi calon ibu hamil ini akan menjadi dasar penentuan total penambahan berat badan selama kehamilan.

4. Pengukuran Lingkar Lengan Atas (Lila) dan Lingkar Panggul

Lingkar lengan merupakan indikator untuk menilai adanya kekurangan energi kronik (KEK). Sementara lingkar panggul untuk menilai ukuran jalan lahir bayi. Dari sini bisa diketahui apakah ibu mempunyai risiko tinggi saat bersalin nanti.

5. Pemeriksaan Tekanan Darah.

Saat para calon pengantin melakukan pemeriksaan kesehatan di Puskesmas yang terdekat dengan wilayah domisili masing-masing, mereka mendapatkan pemeriksaan tekanan darah dari petugas kesehatan. Hasil pemeriksaan kemudian dicatat pada buku Pelayanan Posyandu Prakonsepsi yang dipegang oleh masing-masing ibu. Apabila terdapat ibu dengan kondisi tensi yang cukup tinggi, maka segera dikonsultasikan pada dokter yang bertugas di poli Puskesmas.

6. Pemeriksaan Proteinuria

Pemeriksaan kadar protein pada urin juga dilakukan pada calon pengantin atau wanita usia subur yang mengikuti program Posyandu prakonsepsi. Bila ditemukan urin positif 2 (++), maka segera dirujuk ke dokter yang menangani di poli Puskesmas. Sehingga persiapan kehamilan sehat telah dilakukan sejak dini yakni masa prakonsepsi. Karena calon ibu hamil yang memiliki kadar protein uria positif 2 memiliki risiko lebih tinggi untuk mengalami preklamsia dan eklampsia.

7. Pengukuran Hemoglobin

Pengukuran kadar sel darah merah dalam darah dilakukan pada calon pengantin, wanita usia subur dan anak sekolah yang sudah mendapatkan haid. Bila kadar HB nya rendah (kurang dari 12 g/dL), maka petugas segera mencatat, melakukan penyuluhan serta memberikan kapsul Fe Folat atau Multi gizimikro untuk meningkatkan kadar zat besi/hemoglobin. Bila ditemukan calon ibu yang merencanakan kehamilan memiliki kadar hemoglobin di bawah normal, maka tidak dianjurkan untuk hamil sebelum kadar hemoglobinnya normal.

8. Pemberian Suplemen Tablet Tambah Darah atau Multi Gizimikro

Seluruh wanita prakonsepsi, wanita usia subur, remaja putri dan ibu hamil di Kabupaten

Banggai merupakan sasaran untuk diberikan suplemen Fe Folat atau kapsul multi gizimikro. Saat ini, ada satu lembaga internasional yang berkedudukan di Santa Barbara Amerika Serikat yang bernama Vitamin Angel telah memberikan bantuan kapsul multi gizimikro untuk seluruh sasaran di Kabupaten Banggai sejak Februari 2019. Lembaga ini dengan sukarela memberikan bantuan karena tertarik dengan Program Posyandu Prakonsepsi yang diselenggarakan di Kabupaten Banggai sejak 2015. Mereka memberikan kapsul multigizi mikro sebarangpun yang Banggai butuh tanpa batas waktu. Pemberiannya saat ini mengikuti kaidah atau aturan dari Permenkes Nomor 88 Tahun 2014 tentang pedoman pemberian tablet tambah darah bagi remaja putri, wanita usia subur dan wanita hamil.

Beberapa indikator keberhasilan pelaksanaan Program Posyandu Prakonsepsi ini diantaranya usia kehamilan saat kunjungan pertama(K1) ibu hamil di fasilitas kesehatan/tenaga kesehatan. Diharapkan K1 terjadi saat usia kehamilan masih sangat muda(sedini mungkin). Frekuensi pertemuan dengan petugas kesehatan. Pertemuan antara ibu/calon ibu sebelum kehamilan diharapkan terjadi secara rutin dengan demikian pertemuan saat kehamilan berlangsung juga akan terjadi secara rutin. Adanya Posyandu Prakonsepsi diharapkan dapat menurunkan prevalensi anemia pada wanita usia subur sebesar 50% pada tahun 2025 sesuai dengan target global. Angka kematian bayi (AKB) dan Angka kematian Ibu(AKI) diharapkan dapat turun seminimal mungkin dengan eliminasi faktor-faktor risiko yang ada. Dengan adanya perbaikan status gizi calon ibu, peningkatan pengetahuan, dan perbaikan sikap terhadap kesehatan dan gizi maka diharapkan prevalensi Berat Badan Bayi Lahir Rendah (BBLR) dapat menurun. Terakhir prevalensi *stunting* ditargetkan menyentuh angka 28% pada tahun 2019. Posyandu Prakonsepsi yang dilakukan secara konsisten dengan komitmen tingkat tinggi dari semua *stakeholder*, akan membantu Kabupaten Banggai mencapai target tersebut.

INFORMASI LEBIH LANJUT

Penulis adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Banggai dan dapat dihubungi melalui email aotoluwa@gmail.com

Apa Kabar Papua Millenials?

Apa yang ada dibenak Anda saat mendengar kata Papua? Kalau ingin mengenal Papua dari sisi yang seru, kreatif, kekinian, nah Anda mesti ikut keseruan wawancara kami dengan **Jeni Karay** seorang Papua *social media Influencer* yang konten-kontennya selalu asik.

Di sosial media, Jeni aktif memperkenalkan wajah baru Papua. Apa tujuan Jeni?

Selama ini, mencari contoh teladan yang bagus-bagus itu pasti datangnya dari luar Papua. Saya pikir, kenapa harus cari di luar Papua padahal di sini anak-anak muda punya banyak potensi. Saya bertemu dengan orang-orang yang memasarkan produk-produk lokal yang keren, orang yang punya *skill*, hanya saja mereka tidak memiliki ruang untuk menunjukkan kemampuan mereka. Akhirnya, saya terpikir untuk mengajak mereka berkolaborasi, memanfaatkan relasi yang saya miliki di dalam dan luar Papua untuk mengangkat nama baik Papua. Kita memiliki identitas, kalo bukan kita yang melakukannya lalu siapa lagi? Maka 3 tahun terakhir ini saya gencar membagi ruang dengan teman-teman untuk berkolaborasi, mengajak mereka menunjukkan bahwa Papua tidak hanya sekedar Koteka, Alam yang indah tapi ada banyak unsur lainnya yang bisa dilihat.

Di luar sosial media, kegiatan Jeni apa saja?

Selain kuliah, saya juga aktif di kegiatan humanitarian, kerelawanan. Saya juga aktif menerjemahkan Alkitab ke dalam bahasa Papua. Selain itu saya juga diberi kepercayaan sebagai Duta Komoditas Papua dan Papua Barat. Tugas saya, membantu menjelaskan dan meyakinkan investor bahwa kami anak Papua juga bisa. Kekhawatiran investor yang ingin masuk ke Papua, mereka sering bertanya apakah Papua aman? Infrastrukturnya bagaimana? SDMnya bagaimana? Hal seperti ini yang dijelaskan kepada mereka, meyakinkan mereka bahwa komoditas Papua itu sungguh keren dan kualitas unggul karena organik serta memiliki kualitas untuk pasar global.

Saat ini banyak anak-anak muda keren dengan berbagai antusiasme, gagasan dan gerakan Papua Enthusiast yang berada di luar Papua. Bagaimana Jeni melihat ini?

Beruntungnya karena anak mud aini adalah general milenial, artinya generasi terpelajar pertama. Kemudian kami diuntungkan karena meleak teknologi. Di sinilah platform anak Papua dikembangkan. Beberapa produk yang dikembangkan oleh anak-anak Papua memang keren dan pilihan menjadi pengusaha kemudian menjadi terbuka lebar dengan adanya keuntungan dan perkembangan teknologi. Ini menjadi pemicu untuk bersaing secara sehat diantara mereka. Di sinilah anak milenial Papua mulai berkembang dengan interest masing-masing dengan mengembangkan platform yang dimiliki masing-masing. Agar dapat berkembang, mereka harus membuka ruang berkolaborasi.

Hal apa saja yang bisa mendukung anak Papua bisa memiliki usaha yang dapat berkembang pesat dan mampu go global?

Pertama, ada permintaan global. Kopi Papua adalah kopi terbaik

karena Papua memiliki dataran tinggi di mana kualitas kopi terbaik tumbuh. Saat ini, kemampuan petani untuk menghasilkan kopi sesuai dengan permintaan investor masih belum mampu. Selain itu, tantangan transportasi untuk mengangkut produk tersebut. Orang mulai melirik ke timur, di Papua Barat tanahnya 80% adalah wilayah konservasi di mana kalau kita akan membuat *sustainable business* akan berkembang sekali. Kita anak Papua saat ini, mampukah *skill* kita mengelola ini? Kemampuan-kemampuan lainnya yang dibutuhkan. Siapkan kita mengambil peluang dan potensi ini? Ini yang harus dijawab.

Di masa pandemi, bagaimana aktifitas anak muda Papua?

Di masa pandemi semuanya berdampak. Anak muda Papua yang memiliki *platform social media* mulai membuat Gerakan kepedulian, tidak jarang diantara mereka menjadi perpanjangan tangan orang dari luar Papua untuk menyalurkan bantuan ke Papua. Anak muda pengusaha juga mulai membuat Gerakan donasi dengan menjual produk mereka, menyumbangkan sekian persen keuntungannya untuk membantu masyarakat. Hikmahnya dengan adanya Pandemi ini, anak Papua semakin kreatif. Pemikiran humanitariannya adalah bagaimana *survive*, bagaimana memberikan dampak positif bagi masyarakat, sama-sama saling bantu.

Apakah ada Anak Papua yang tertarik pada politik?

Ada banyak juga anak Papua yang mulai terjun ke dunia politik dengan mencalonkan diri menjadi wakil rakyat dan media kampanyenya juga mulai beragam, mulai memanfaatkan platform social media. Kalau dari segi prestasi, salah satu contohnya Kak Billy Mambrasah sebagai staf khusus presiden dari Papua dan mulai diperhitungkan keberadaan mereka di dunia pemerintahan.

Bagaimana Jeni melihat anak muda merasa bangga dengan identitas mereka sebagai anak Papua?

Dulu, anak Papua dengan rambut keriting memilih untuk meluruskan rambutnya, malu dengan rambut keriting. Orang di luar sangat suka dengan Papua, dengan berbagai keberagaman dan kekayaan lokal, bahasa daerah saja ada 250 bahasa. Sekarang anak-anak mulai bangga dengan identitas diri sebagai anak Papua.

Saat ini Jeni juga sudah merambah Podcast. Bagaimana Jeni memanfaatkan peluang ini?

Saya punya banyak ide, gagasan, pemikiran-pemikiran dan semuanya ada di kepala saya. Saya ingin membaginya dengan banyak orang. Pengetahuan yang saya miliki akan bermanfaat apabila saya bagi.

Bagaimana tanggapan Jeni terhadap konten ujaran kebencian di sosial media?

Kita harus mengedukasi orang-orang dengan memposting hal-hal yang positif, filter ada dalam diri masing-masing. Gunakan sosial media dengan sebaik mungkin karena kita sedang membuat galeri tentang diri kita sendiri. Peran sosial media saat ini sangat fundamental dan peluang besar untuk menjadi sumber pendapatan apabila dikelola secara maksimal.

Apa mimpi Jeni ke depan?

Saya mau jadi pengusaha, membuka lapangan kerja buat banyak orang, saya mau kasih makan saya punya masyarakat. "Pergunakan sosial media dengan sebijak mungkin, maka itu akan mendatangkan manfaat buat banyak orang, dengan begitu kebaikan akan datang padamu" Jeni Karay

Artikel

Eksotisnya Keberagaman Pangan Lokal Luwu Utara dan Peran Perempuan didalamnya

Pangan lokal harus selalu dipromosikan untuk meningkatkan ekonomi masyarakat lokal. Termasuk pengembangan SDM yang berkecimpung dalam pengolahan produk pertanian ini. Pangan lokal bisa jadi identitas kebudayaan, yang memungkinkan ekologi ikut terjaga, di mana tak ada pangan lokal yang tumbuh dari kebudayaan dan lingkungan yang rusak. Perempuan dianggap memiliki peranan yang besar dalam memastikan ketersediaan pangan di Indonesia. Begitu juga dengan generasi muda yang didorong untuk tertarik bekerja pada sektor pertanian.

Bupati Lutra tengah mendorong upaya diversifikasi pangan tidak hanya beras, tetapi juga non beras, seperti sagu, ubi kayu, jagung dan jenis pangan lainnya.

<https://batukarinfo.com/komunitas/articles/eksotisnya-keberagaman-pangan-lokal-luwu-utara-dan-peran-perempuan-didalamnya>

Referensi



Booklet Ketahanan Pangan dan Ekonomi Kampung

Pandemi Coronavirus Disease 2019 (COVID-19), bisa menciptakan krisis pangan, termasuk di Papua dan Papua Barat, yang sebenarnya kaya sumber pangan lokal. Guna mengantisipasi hal tersebut terjadi, berbagai aktifitas kegiatan ekonomi kampung termasuk aktifitas pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan untuk menjaga ketahanan pangan termasuk kembali memproduksi pangan lokal macam sagu, petatas, kombili, pisang dan lain-lain.

<https://batukarinfo.com/referensi/booklet-ketahanan-pangan-dan-ekonomi-kampung>

Peluang

Applications Open for the International Business Readiness a Course for Women-led MSMEs in the Food Sector (IA-CEPA)

Are you working in a women-led Micro, Small and Medium Enterprise (MSME) in the food sector, a relevant Indonesian Government agency or a business association and looking to learn about expanding overseas? Apply for the International Business Readiness – a Course for Women-led MSMEs in the Food Sector (IA-CEPA) Short Term Award.

The course aims to support Indonesian women-led MSMEs in the food sector to expand their international operations, particularly into Australia, and benefit from the Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement (IA-CEPA). With course participants from Indonesian Government agencies, business associations and the private sector, the course will also encourage an exchange of ideas around policies to support women-led businesses to succeed internationally.

This is a fully funded course. The course is offered to women only. Women with disabilities are encouraged to apply.

All applications MUST be submitted online before 27 September 2020

<https://batukarinfo.com/news/applications-open-international-business-readiness-%E2%80%93-course-women-led-msmes-food-sector-ia-cepa>

Berita

Sekolah anak: Sinyal ponsel sulit diakses, guru dan murid di Sumbawa gunakan handy talkie

Kegiatan pembelajaran jarak jauh yang sempat diberlakukan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di semua daerah di Indonesia selama masa pandemi Covid-19 menciptakan persoalan di daerah-daerah yang tidak terjangkau sinyal televisi dan internet.

SMPN 3 Satap Punik, Kecamatan Batu Lanteh, Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat (NTB), menyiasati persoalan ini dengan menggunakan radio komunikasi dua arah atau handy talkie (HT).

Metode ini digunakan oleh para murid dan guru di sekolah tersebut karena mereka tidak bisa menggunakan ponsel pintar mengingat kawasan tersebut tidak terjangkau sinyal telepon. Hanya ada sejumlah titik saja yang bisa dijangkau sinyal.

<https://batukarinfo.com/news/sekolah-anak-sinyal-ponsel-sulit-diakses-guru-dan-murid-di-sumbawa-gunakan-handy-talkie>